



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021



INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Basuki Rachmad No.209 Lamongan Kode Pos :62217

Telp. (0322) 321019, Fax(0322) 321144 e-mail :inspektorat@lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya karena Inspektorat Kabupaten Lamongan telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 tepat waktu.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan perlu dinilai secara terukur tingkat keberhasilannya. Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021 ini adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama Tahun 2021 serta diharapkan sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang terkait dalam mengevaluasi pelaksanaan kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagaimana yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2021.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Lamongan, semoga laporan ini bermanfaat dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi upaya-upaya perbaikan dan penetapan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Lamongan sehingga pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang, dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi sesuai dengan tuntutan serta aspirasi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait.

Lamongan, Januari 2022

INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN

Drs. HENDI PRAMONO
Pembina Utama Muda
0805 198903 1 010

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistim pertanggungjawaban secara periodik. Dari Visi Kabupaten Lamongan, Inspektorat Kabupaten Lamongan masuk kedalam Misi yang ke 4 (empat) dan Tujuan ke 4 (empat), yang kemudian untuk mencapai Misi tersebut, diuraikan melalui program dan kegiatan.

Dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Lamongan, pada Tahun Anggaran 2021 terdapat 1 (satu) sasaran strategis yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah pada 6 (enam) Indikator Kinerja, yaitu:

1. Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP selesai, Indikator ini tercapai dengan katagori **sangat berhasil** yaitu 98,36% dari target 87% dengan capaian kinerja 113,05%.
2. Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti ini tercapai dengan katagori **sangat berhasil** dengan realisasi 100% target 100%.
3. Persentase PD dengan katagori Nilai Evaluasi SAKIP minimal B. Indikator ini tercapai dengan katagori **sangat berhasil** yaitu 100 % dari target 100% dengan capaian yaitu 100%. Keberhasilan pencapaian indikator ini dikarenakan peran serta kepala PD yang meningkatkan kinerjanya.
4. Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Selesai tercapai dengan katagori **sangat berhasil** dengan realisasi yaitu 88,90% dari target 80%, sehingga capaian kinerja 111,12%.
5. Jumlah PD dengan tingkat maturitas SPIP level 2/berkembang, Indikator ini tercapai dengan katagori **sangat berhasil** yaitu 15 PD dari target 5 PD dengan capaian kinerja 300%.
6. Level Kapabilitas APIP, Indikator ini tercapai dengan katagori **sangat berhasil** yaitu level 3 dari target level 3 dengan capaian kinerja 100%.

Secara keseluruhan indicator sasaran Inspektorat Kabupaten Lamongan tahun 2021 terealisasi lebih dari 100% atau **interpretasi memuaskan**, pada tahun 2021 telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 10.455.750.660 (sepuluh milyar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah) secara efektif telah

mewujudkan capaian Kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lamongan. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan adalah 91,88% dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Inspektorat Kabupaten Lamongan perlu dioptimalkan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lamongan.

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Inspektorat Kabupaten Lamongan, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Inspektorat Kabupaten Lamongan memiliki tingkat keberhasilan sesuai dengan harapan. Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan dan menjadi penyemangat untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Lamongan, Januari 2022


INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN
Drs. HEV PRANOTO
Pengarah Utama Muda
NIP. 19620805 198903 1 010

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Tugas, Pokok, Fungsi dan Atruktur Organisasi.....	3
1.4. Data Umum Organisasi.....	10
1. Personil.....	10
2. Sarana dan Prasarana.....	11
3. Pembiayaan.....	14
1.4.. Sistematika Penyajian LKjIP.....	14
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	17
2.1. Rencana Strategik.....	17
1. Visi – Misi.....	18
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.....	18
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2021.....	19
Program dan Kegiatan.....	21
2.3. Perjanjian kinerja Tahun 2021.....	22
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	44
3.1. Pencapaian Kinerja Tahun 2021.....	39
3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA.....	62
3.3. Analisis penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan 2021.....	67
3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	70

3.5.	Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	73
3.6.	Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2021.....	74
BAB IV	: PENUTUP.....	78
1.	Kesimpulan.....	78
2.	Saran.....	79
 LAMPIRAN-LAMPIRAN		
1.	FORMULIR RENCANA STRATEGIK (RS) TAHUN 2016-2021.....	80
2.	FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2021.....	82
3.	FORMULIR PENGUKURAN KINERJA (KurJa) TAHUN 2021.....	88
4.	IKU TAHUN 2021.....	90
5.	FORMULIR PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021.....	93

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan perlu dinilai secara terukur tingkat keberhasilannya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Berangkat dari pemikiran diatas, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, kewenangan organisasi dan pengelolaan sumberdaya yang didasarkan kepada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disampaikan kepada atasan masing-masing instansi. Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang telah dirancang dan disusun dalam format Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian didefinisikan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memuat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan organisasi yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan-kegiatan sesuai perencanaan strategis. Selain pertanggungjawaban Kinerja, dalam laporan ini juga berisi pertanggungjawaban keuangan atas anggaran yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021 merupakan laporan ke 5 (empat) dari 5 (lima) tahun perencanaan strategis, dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Inspektorat Kabupaten Lamongan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam melaksanakan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2021 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan di tahun yang akan datang.

1.2. Maksud dan tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021 adalah untuk mengkomunikasikan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan capaian kinerja program dan kegiatan selama satu tahun anggaran yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat (masyarakat) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai selama tahun anggaran 2021;
2. Sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan yang telah dipercayakan kepada Inspektorat Kabupaten Lamongan
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan untuk perbaikan secara berkesinambungan sebagai ikhtiar meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

1.3. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Inspektorat Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019** tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan.

1.3.1. Tugas

Inspektorat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknik administratif mendapat pembinaan dari sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas " melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

1.3.2. Fungsi

Selanjutnya untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, maka Inspektur Kabupaten Lamongan, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penetapan petunjuk operasional masing-masing program kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat ;
- b. penetapan dan pengendalian Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan masing-masing program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- c. perumusan dan penetapan bahan kebijakan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan dan penilaian terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan desa;

- d. penyelenggaraan pemeriksaan reguler berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan non PKPT;
- e. penyelenggaraan pengujian terhadap laporan keuangan perangkat daerah;
- f. penyelenggaraan pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;
- g. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h. penyelenggaraan pembinaan tenaga fungsional/ pengawasan di lingkungan Inspektorat;
- i. penyelenggaraan koordinasi dan review laporan keuangan daerah sebelum dilakukan oleh BPK dan mengoordinasikan dan mereview Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah AKIP/LAKIP Pemerintah Daerah;
- j. penyelenggaraan pengawasan terhadap dana bantuan atas dasar permintaan;
- k. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas Inspektorat;
- l. pengendalian dan pengesahan laporan keuangan Inspektorat untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan;
- m. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1.3.3. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Inspektorat Kabupaten Lamongan mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Inspektur;
2. Sekretariat;
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, dan Inspektur Pembantu Wilayah III;
4. Inspektur Pembantu Investigasi;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun masing-masing jabatan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Sekretariat** yang dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur dan bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi penyiapan bahan koordinasi pengawasan dan pelayanan administratif dan fungsional di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi umum. Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian, evaluasi serta pelaporan;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian, evaluasi serta pelaporan;
 - c. pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - d. penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - e. penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - f. penyelenggaraan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - h. penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - i. menyelenggarakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Inspektorat;
 - j. penyeliaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian, evaluasi serta pelaporan.

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dimana masing-masing bagian tersebut memiliki tugas yang dapat dijelaskan sesuai pasal 9.

2. Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, dan Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada masing-masing wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ sesuai bidang tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian program kerja pengawasan pemerintah bidang pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan pada masing-masing wilayah kerjanya;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerja;
 - d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerja;
 - e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerja;
 - f. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerja;
 - g. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait;
 - h. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pembinaan dan pengawasan dengan pengawas internal Pemerintah lainnya;

- i. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan pada masing-masing wilayah kerja;
- j. Penyelenggaraan analisis dan verifikasi hasil pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerja;
- k. Penilaian hasil kerja bawahan secara berjenjang dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada pimpinan;
- m. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

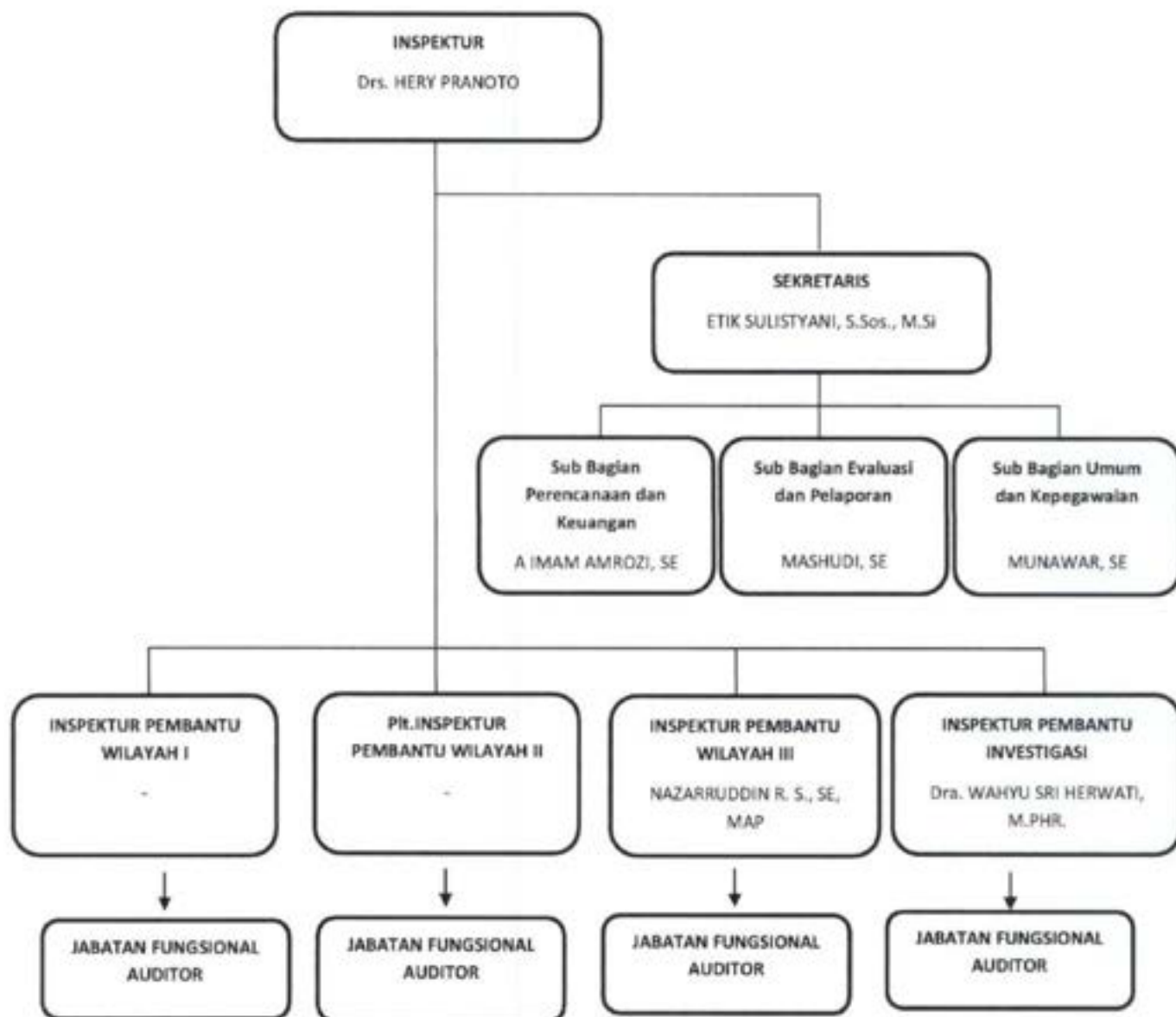
3. **Inspektur Pembantu Investigasi** mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengawasan terkait pencegahan tindak pidana korupsi;
- b. Penyelenggaraan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ sesuai bidang tugasnya;
- c. Penyelenggaraan pengawasan terkait pencegahan tindak pidana korupsi;
- d. Penyelenggaraan koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi MCP Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilakukan oleh Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian rencana aksi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan monitoring terhadap pelaksanaan pencapaian dan pengelolaan LHKPN/LHKSNI;
- f. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi;

- g. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tim saber pungli dan melakukan sosialisasi saber pungli;
- h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan saber pungli;
- i. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan maturitas SPIP Kabupaten Lamongan serta melakukan evaluasi pelaksanaan maturitas SPIP Kabupaten Lamongan;
- j. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- k. Penyelenggaraan monitoring pelaksanaan Wilayah Bebas Korupsi dan penerapan Zona Integritas;
- l. Penyelenggaraan monitoring penerapan Whistle Blowing System;
- m. Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu melalui pemeriksaan, pengusutan, pengujian terhadap indikasi tindak pidana korupsi atas penugasan dari pimpinan;
- n. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait;
- o. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan untuk tujuan tertentu dengan pengawas eksternal pemerintah dan Aparat Penegak Hukum;
- p. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam bentuk bagan struktur adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.3
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN



1.4. Data Umum Organisasi

1. Personil

Dalam Kegiatan dan tugas di bidang pengawasan didukung sumberdaya manusia, sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Data Kepegawaian Berdasarkan Jabatan, Pangkat/Golongan
Serta Jenjang Pendidikan

No.	Jabatan struktural	Jml	Pangkat/Ruang	Jml	Pendidikan Formal	Ket.
A. Jabatan Struktural						
1.	Inspektur	1	Pembina Utama Muda /IV-c	1	S-1	
2.	Sekretaris	1	Pembina Tingkat I/IV-b	1	S-2	
3.	Irbanwil	2	Pembina Tingkat I/IV-b	1	S-2	
			Pembina /IVa	1	S-2	
4.	Ka.sub.Bagian	3	Penata /III-c	1	S-2	
			Penata Tingkat I/III-d	1	S-1	
			Pembina I/IVa	1	S-2	
5.	Staf	16	Penata Muda Tk I/III-b	1	S-1	
				1	S-2	
			Penata Muda/III-a	8	S1	
				1	D3	
				3	SMA	
			Pengatur Tk.I/II-d	1	SMK	
			Juru	1	SD	
B. Jabatan Fungsional 21						
1.	Auditor	3	Auditor Pertama	3	S1	
		12	Auditor Muda	4	S2	
				8	S1	
		6	Auditor Madya	4	S2	

No.	Jabatan struktural	Jml	Pangkat/Ruang	Jml	Pendidikan Formal	Ket.
			Auditor Madya	2	S1	
	Jumlah	44		44		

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.3.1

Sarana dan Prasarana yang ada di Inspektorat Kab. Lamongan

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Barang (unit)		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung Kantor	1	-	1
2	Kendaraan Dinas Roda 4	8	-	8
3	Kendaraan Dinas Roda 2	14	-	14
5	Lemari Besi / Metal	2	-	2
5	Rak Besi / Metal	2	-	2
6	Rak Kayu	2	-	2
7	Filing Besi / Metal	12	-	12
8	Filing Plastik	2	-	2
9	Mesin Penghancur Kertas	6	-	6
10	Vacum Cleaner	1	-	1
11	Copy Board / Elektrik White Board	3	-	3
12	Lemari Kayu	1	-	1
13	Kursi Besi / Metal	2	-	2
14	Kursi Kayu / Rotan / Bambu	-	6	6
15	Meja Tulis	19	-	19
16	Kursi Rapat	75	-	75
17	Kursi Tamu	64	-	64
18	Sofa	9	-	9
19	Meja Tamu	1	-	1
20	Gorden Gordenplis	6	-	6
21	Jam Elektronik	-	2	2
22	AC Unit	24	-	24

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Barang (unit)		Jumlah
		Baik	Rusak	
23	Kipas Angin	-	7	7
24	Televisi	2	-	2
25	Alat Pemadam / Portable	1	-	1
26	P.C Unit	62	-	62
27	Lap Top	26	-	26
28	Scanner	7	-	7
29	Monitor	14	-	14
30	Printer	55	-	55
31	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	-	1
32	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	-	1
33	Meja Kerja Pejabat Eselon III	8	-	8
34	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	45	-	45
35	Meja Pertemuan	6	-	6
36	Meja Rapat di ruang VIP	1	-	1
37	Meja Auditor	20	-	20
38	Meja Kerja Staf	56	-	56
39	Kursi Kerja Staf	19	-	19
40	Meja Rapat Pejabat Eselon III	3	-	3
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	-	2
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	11	-	11
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	45	-	45
44	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	12	-	12
45	Lemari Arsip	8	-	8
46	Alat studio	1	-	1
47	Speaker Aktif	2	-	2
48	Camera + Attachmen	10	-	10
49	Proyektor	3	-	3
50	Telepon dan Jaringan	5	-	5
51	CCTV	1	-	1
52	Faximile	1	-	1
53	Handy came 7,1 MP	1	-	1
54	Sound Sistem Wirelesss	1	-	1
55	Jalan, irigasi dan jaringan	1	-	1
56	Mesin Absensi (Mesin Pintu)	2	-	2
57	Meja Tambahan (Meja TV (Meja Tambahan))	1	-	1
58	Meja Tambahan (Meja Pertemuan (Meja Tambahan))	7	-	7
59	AC Split (AC Split)	8	-	8

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Barang (unit)		Jumlah
		Baik	Rusak	
61	Standing Breaket TV (Bracket Montorized remote)	1	-	1
62	P.C. Unit (PC. Unit)	2	-	2
63	Lain-lain (Wall Screnn (LAYAR PROYEKTOR 213X213))	1	-	1
64	Printer (Printer)	10	-	10
65	Scanner (Scanner)	5	-	5
66	Meja Kerja Pegawai Non struktural (Meja Auditor (Meja Kerja Pegawai Non struktural))	12	-	12
67	Lemari Arsip Untuk arsip Dinamis (Lemari arsip)	3	-	3
68	Proyektor + Attachment (Proyektor WXGA 2700 Lumens)	1	-	1
69	Mesin Akses Control Pintu Selection	1		1
70	Komputer PC	2		2
71	Notebook	4		4
72	Lemari Besi	4		4
73	Lemari Kaca	4		4
74	Proyektor + Attachment	1		1
75	Kursi Kerja Staf	18		18
76	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	78		78
77	Sound System	1		1
78	Stabilisator	1		1
79	P.C. Unit	3		3
80	Televisi	1		1
81	Audio Mbding Portable	1		1
82	Microphone/Wireless Mic	2		2
83	Tripod Camera	1		1
84	(Mainframe) 1 Buah	1		1
85	(CPU) 1 Unit	1		1
86	Proyektor + Attachment	2		2

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Barang (unit)		Jumlah
		Baik	Rusak	
87	Audio Mbding Portable	1		1
88	Microphone/Wireless Mic	2		2
89	Tripod Camera	1		1
90	Televisi	1		1
91	Lemari es	1		1
92	Lemari Besi	1		1
93	Briket	1		1
94	Asset Tetap Lainnya	1	-	1
JUMLAH		889	15	904

3. Pembiayaan

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan sasaran indikator, dengan 3 (tiga) program. 10 (sepuluh) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 11.379.315.074,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.455.750.660,00 atau 91,88%, sisa dana sebesar Rp. 923.564.414 atau 8,12%.

1.5 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini, mengkomunikasikan pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan selama tahun 2021. Capaian kinerja (performance results) 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap)

bagi perbaikan kinerja di masa datang, dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. BAB I - PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum organisasi yang terdiri dari personil, sarana prasarana dan pembiayaan serta sistematika Penyajian LKjIP. .

2. BAB II - PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan Rencana Strategis yang terdiri tujuan, sasaran dan indikator sasaran. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021, Program dan Kegiatan dan Perjanjian Kinerja tahun 2021.

3. BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan Capaian Kinerja Organisasi, Pencapaian Kinerja, Perbandingan Realisasi Kinerja, Perbandingan Kinerja sampai akhir Periode RPJMD, Perbandingan Realisasi kinerja dengan realisasi Nasional, Analisis Penyebab keberhasilan yang telah dilakukan, analisis efesiensi penggunaan sumberdaya, analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/pencapaian kinerja serta realisasi anggaran.

4. BAB IV - PENUTUP

Dalam Bab ini diuraikan simpulan atas capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dan saran langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Inspektorat untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. MATRIK RENCANA STRATEGIK (RS) TAHUN 2016-2021
2. FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2021
3. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA (KurJa) TAHUN 2021

4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

5. SK IKU TAHUN 2021

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi aspirasi stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis organisasi.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan Kekuatan (Strenghts), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Tantangan (Threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah

Inspektorat Kabupaten Lamongan mempunyai rencana strategis 2016 – 2021 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala / hambatan yang kemungkinan timbul. Rencana stratejik Inspektorat Kabupaten Lamongan 2016 -2021 yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam bab ini.

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Lamongan yaitu:

"Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing"

Makna dari visi tersebut adalah dalam kurun 5 tahun mendatang Inspektorat Kabupaten Lamongan diharapkan akan mewujudkan Lamongan Lebih Sejahtera melalui pengawasan yang professional, berkualitas dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan didukung aparatur yang jujur dan profesional untuk memberikan motivasi ke arah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dalam upaya mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut Inspektorat Kabupaten Lamongan masuk ke misi 4 (empat), yaitu :

" Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik"

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan

Dalam mewujudkan misi ke 4 (empat) Inspektorat Kabupaten Lamongan masuk dalam Tujuan ke 1 (satu) yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel serta untuk peningkatan pelayanan public, dengan sasaran ke 1 (satu) yaitu Meningkatkan Perencanaan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kemandirian Fiscal Daerah, dari sasaran RPJMD tersebut tujuan yang ingin dicapai organisasi adalah target – target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan kinerja. Berdasarkan visi, misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan Inspektorat Kabupaten Lamongan menetapkan tujuan dan indikator Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tujuan	Indikator
Meningkatnya Efektivitas Fungsi Pengawasan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan	Persentase OPD yang tidak terdapat temuan material /keuangan
	Hasil Opini BPK
	Nilai Maturitas SPIP

Sasaran

Dari tujuan tersebut Inspektorat mempunyai 1(satu) sasaran yang merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategis, Sasaran-sasaran Inspektorat Kabupaten Lamongan dan indikatornya sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah.	Persentase Tindak lanjut Rekomendasi APIP selesai
	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
	Persentase PD dengan katagori Nilai Evaluasi SAKIP minimal B
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Selesai
	Jumlah PD dengan tingkat maturitas SPIP Level 2 / Berkembang
	Level Kapabilitas APIP

2.2.RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Lamongan untuk tahun 2021 diturunkan dari Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

RKA (Rencana Kerja Anggaran) disusun mengacu kepada klasifikasi anggaran yaitu belanja daerah menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Jadi RKT memuat rencana capaian kinerja dari Renstra yang bersifat tahunan, yaitu

target-target kinerja output dari setiap kegiatan, target outcome dari setiap sasaran dalam mendukung tujuan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat untuk tahun 2021, disajikan di dalam Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT).Terkait dengan rencana kinerja tahunan, supaya rencana/target capaian kinerja yang tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat terukur, maka disusun indikator kinerja yaitu indikator output dan outcome yang disusun sesuai dengan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan DPA Awal tahun 2021.

Komponen rencana kinerja tahunan tahun 2021 yang disusun berdasarkan Renstra secara rinci memuat tentang tujuan, program, sasaran/ kegiatan, output dan indikator output, serta outcome dan indikator outcome.

Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus dikelola. Penetapan indikator kinerja dimaksudkan untuk dapat menggambarkan kinerja sasaran dan kegiatan yang hendak dicapai sebagai target capaian kinerja. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut diupayakan memiliki kriteria spesifik dan jelas, dapat diukur secara obyektif, layak dicapai, serta relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu tertentu. Di dalam rencana kinerja tahunan tahun 2021, indikator kinerja yang dikembangkan dan disepakati untuk pengukuran capaian kinerja adalah indikator output dan outcome dan diuraikan berdasarkan kegiatan dan sasaran serta target kuantitatif atau kualitatifnya.

Indikator outcome yang ditetapkan lebih merupakan indikator yang bersifat immediate outcome yang akan dicapai dan dapat diukur pada akhir tahun anggaran berjalan. Indikator output ditetapkan pertahun berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari masing-masing kegiatan.

Berikut akan disampaikan mengenai rencana kinerja tahun 2021 baik berupa sasaran berserta indikator kinerja serta program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2021 yang tertuang dalam rencana kinerja tahun 2021, sebagaimana pada lampiran 2.

Program dan Kegiatan

Sebagaimana Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2016 – 2021, maka Inspektorat Kabupaten Lamongan mempunyai 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan yang terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, melalui kegiatan:

- 1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 4). Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 6). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, melalui kegiatan:

- 1). Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
- 2). Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, melalui Kegiatan:

- 1). Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
- 2). Pendampingan dan Asistensi.

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Inspektorat Kabupaten Lamongan telah membuat perjanjian kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021 dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Adapun sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021, dapat digambarkan pada Tabel di Bawah ini :

Tabel 2.3.1

Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Lamongan Tahun 2021

NO.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan kinerja Perangkat	1. Persentase Tindakanjutan Rekomendasi APIP selesai	87%
		2. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Selesai	80%
		3. Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%

Daerah.	4. Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP Level 3/ berkembang	5 OPD
	5. Nilai Maturitas SPIP Kabupaten	level 3
	6. Persentase PD dengan katagori Nilai Evaluasi SAKIP minimal B	100%
	7. Persentase OPD yang tidak terdapat temuan material /keuangan	95%
	8. Opini Pemeriksa Eksternal	WTP
	9. Level Kapabilitas APIP	Level 3

Indikator kinerja utama Inspektorat Tahun 2021 terdiri dari 9 (Sembilan) indikator antara lain :

1. Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP selesai, Indikator ini tercapai dengan katagori **sangat berhasil** yaitu 98,36% dari target 87% dengan capaian kinerja 113,05%. Indikator ini didukung oleh 3 (tiga) Kegiatan yaitu Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah; Pengawasan Desa dan Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP. Keberhasilan indikator ini dikarenakan peran tim TLHP aktif dalam penagihan TLHP kepada Obyek Pemeriksaan baik melalui surat maupun panggilan langsung yang belum menyelesaikan tindaklanjut hasil pemeriksaan dan Obyek Pemeriksaan juga kooperatif dalam menyelesaikan tindaklanjut hasil pemeriksaan.
2. Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti ini tercapai dengan katagori **sangat berhasil** dengan realisasi 100% target 100%. Indikator ini didukung 1 (satu) Kegiatan yaitu Pengawasan dengan tujuan tertentu. Keberhasilan indikator ini dikarenakan optimalisasi peran APIP dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Kabupaten Lamongan. Inspektorat Kabupaten Lamongan menangani pengaduan masyarakat terkait dengan kinerja pemerintah guna terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dan telah dilakukan pemeriksaan dan penanganan sebanyak 26 dumas dari target 20 dumas, dengan rincian:
 - Yang masuk Inspektorat sebanyak 9 dumas

- Pelimpahan dari Setda Kab. Lamongan sebanyak 1 dumas
- Pelimpahan dari kepolisian sebanyak 9 dumas
- Pelimpahan dari Kejaksaan sebanyak 7 dumas

Adapun kegiatan penunjang dari indikator ini yaitu Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi yang berupa sosialisasi dan pencerahan produk-produk hukum terkait dengan penegakan aturan dan percepatan pemberantasan korupsi di Kabupaten Lamongan, yang bekerjasama dengan Polres Lamongan dan Kejaksaan Negeri Lamongan, Tim Sapu Bersih Pungli dan Verifikasi LHKASN.

3. Persentase PD dengan katagori Nilai Evaluasi SAKIP minimal B. Indikator ini tercapai dengan katagori **sangat berhasil** yaitu 100 % dari target 100% dengan capaian yaitu 100%. Indikator ini didukung oleh 2 (dua) Kegiatan yaitu Reviu Laporan Kinerja dan Reviu Laporan Keuangan. Keberhasilan pencapaian indikator ini dikarenakan peran serta Kepala PD dalam meningkatkan kinerjanya dan tak henti-hentinya Tim SAKIP Kabupaten memberikan arahan, desk dan evalausi kinerja di semua OPD.
4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Selesai, tercapai dengan katagori **sangat berhasil** dengan realisasi yaitu 88,90% dari target 80%, dan capaian kinerja 111,12%. Keberhasilan ini dikarenakan adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja dan optimalisasi tindak lanjut rekomendasi BPK dengan koordinasi yang baik antara Tim dengan Obrik yang bersangkutan sehingga temuan BPK dapat diselesaikan sesuai dengan target yang direncanakan.
5. Jumlah PD dengan tingkat maturitas SPIP level 2/berkembang, Indikator ini tercapai dengan katagori **sangat berhasil** yaitu 15 PD dari target 5 PD dengan capaian kinerja 300%. Indikator ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yaitu Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas. Keberhasilan indikator ini dikarenakan adanya pendampingan dari auditor kepada OPD. Untuk tahun akan datang akan di bentuk tim asesor di masing-masing OPD untuk melakukan penilaian mandiri.
6. Level Kapabilitas APIP, indikator ini tercapai dengan katagori sangat berhasil yaitu mencapai level 3 dari target level 3 dengan capaian 100%. Indikator ini didukung oleh 7 (tujuh) Kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

Kerjasama Pengawasan Internal; Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan; Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan; Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah; Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB; dan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi. Keberhasilan indikator ini dikarenakan kerja keras APIP untuk memenuhi Indikator-indikator yang ada di Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dan adanya pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

7. Persentase OPD yang tidak terdapat temuan material /keuangan, yang diukur adalah jumlah OPD yang mendapat temuan material minimal 1/1000 dari jumlah anggaran kegiatan OPD. Indikator ini tercapai dengan kategori **sangat berhasil** yaitu 95,05% dari target 95% dengan capaian kinerja 101,11%. Keberhasilan indikator ini dikarenakan peran serta obyek pemeriksaan yang telah mempertanggungjawabkan Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Daerah.
8. Opini Pemeriksa Eksternal, yang diukur adalah hasil opini BPK – RI, Indikator ini tercapai dengan kategori **sangat berhasil** yaitu WTP dari Target WTP dengan capaian 100%. Keberhasilan indikator ini dikarenakan peran serta obyek pemeriksaan yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK RI.
9. Level Kapabilitas APIP, yang diukur adalah level kapabilitas APIP hasil Quality Assurance (QA) BPKP. Indikator ini tercapai dengan kategori **sangat berhasil** yaitu Level 3 dari Target Level 3 dengan capaian 100%.

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2021, Inspektorat Kabupaten Lamongan mendapat dukungan anggaran APBD yang digunakan untuk melaksanakan dengan 3 (tiga) program kegiatan, 10 (sepuluh) kegiatan dan 33 Sub Kegiatan, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 11.379.315.074,00 dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.3.2

Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	INSPEKTORAT	11.379.315.074,00
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.389.315.074,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	30.000.000,00
	Evaluasi Kinerja PD	20.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.908.271.574,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.868.271.574,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	20.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran OPD	20.000.000,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	462.569.500,00
	Penyediaan komponen listrik/Penerangan Bangunan kantor	15.000.000,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan	197.569.500,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000,00
	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	90.000.000,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	535.474.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	164.126.000,00

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	356.348.000,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.000.000,00
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000,00
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	480.000.000,00
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	400.000.000,00
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100.000.000,00
	Reviu Laporan Kinerja	40.000.000,00
	Reviu Laporan Keuangan	40.000.000,00
	Pengawasan Desa	110.000.000,00
	Kerjasama Pengawasan Internal	70.000.000,00
	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	40.000.000,00
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	80.000.000,00
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	30.000.000,00
	Pengawasan dengan tujuan tertentu	50.000.000,00
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	510.000.000,00
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	50.000.000,00
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	25.000.000,00

	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	25.000.000,00
2	Pendampingan dan Asistensi	460.000.000,00
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	250.000.000,00
	Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB	40.000.000,00
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi	50.000.000,00
	Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	120.000.000,00

Catatan:

	Program
	Kegiatan

Tabel 2.4.3

Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat	Persentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani dengan Baik	83 %
	Persentase sarana pasarana aparatur dengan kondisi baik	85%
	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	90%
Meningkatnya Profesionalisme aparatur pengawasan	% APIP yang mendapatkan sertifikat dalam mengikuti bimtek/diklat substansial dan fungsional dengan nilai di atas 70	80%

Indikator kinerja Individu Sekretaris pada Inspektorat Tahun 2021 terdiri dari 4 (empat) indikator antara lain:

1. Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik, dimana yang diukur adalah Data Pendukung yang Pelayanan Administrasi Perkantoran yang direalisasikan dengan baik.
2. Presentase sarana pasarana aparatur dengan kondisi baik, dimana yang diukur adalah Sarana Prasarana yang direalisasikan dalam keadaan baik.
3. Presentase dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu, yang diukur adalah Laporan Keuangan atau capaian kinerja yang tepat waktu
4. Presentase APIP yang mendapatkan sertifikat dalam mengikuti bimtek/diklat substansial dan fungsional dengan nilai di atas 70, diukur dari nilai Posttest Bimtek/Diklat substansial dan fungsional.

Sasaran strategis tersebut di dukung oleh 6 (enam) kegiatan yang di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) sub kegiatan, sebagaimana pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.4.4

**Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis Sekretaris Pada
Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021**

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.908.271.574
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	462.569.500
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	535.474.000
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373.000.000

Tabel 2.4.5

Perjanjian Kinerja Irbanwil I pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya pelaksanaan program pengawasan yang sesuai dengan Rencana Program Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan	85%
Terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah I dan Memastikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai rekomendasi	Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah I	85%
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan selesai pada wilayah I	85%
Terlaksananya Pendampingan BPKP Perwakilan Prov. Jatim	Jumlah laporan pendampingan dari BPKP Perwakilan Jatim tepat waktu	2 Laporan

Indikator kinerja Individu Irbanwil I pada Inspektorat Tahun 2021 terdiri dari 4 (empat) indikator antara lain :

1. Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan, yang diukur dari pelaksanaan program pengawasan yang dilaksanakan yang sesuai dengan jadwal rencana pengawasan
2. Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah I, diukur dari Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan sesuai berakhirnya dengan Surat Tugasnya
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan selesai pada wilayah I, diukur dari TLHP selesai dari Irban I
4. Jumlah laporan pendampingan dari BPKP Perwakilan Jatim tepat waktu.

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2021, Irbanwil I pada Inspektorat Kabupaten Lamongan mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp. 290.000.000 yang digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) Kegiatan dengan 4 (empat) Sub Kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 2.4.6

**Program yang Mendukung Sasaran Strategis Irbanwil I pada Inspektorat
Kabupaten Lamongan Tahun 2021**

NO	Kegiatan	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 96.666.000	
	JUMLAH	Rp. 96.666.000	

Tabel 2.4.7

Perjanjian Kinerja Irbanwil II pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya pelaksanaan program pengawasan yang sesuai dengan Rencana Program Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan	85%
Terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah II dan Memastikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai rekomendasi	Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah II	85%
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan selesai pada wilayah II	85%
Terlaksananya Pendampingan Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Jumlah Laporan Pendampingan tepat waktu	2 Laporan

Indikator kinerja Individu Irbanwil II pada Inspektorat Tahun 2021 terdiri dari 4 (empat) indikator antara lain :

1. Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan, yang diukur dari pelaksanaan program pengawasan yang dilaksanakan yang sesuai dengan jadwal rencana pengawasan

2. Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah II, yang diukur dari Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan sesuai berakhirnya dengan Surat Tugasnya
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan selesai pada wilayah II
4. Jumlah Laporan Pendampingan tepat waktu, dimana yang diukur dari laporan pendampingan yang tepat waktu di buat.

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2021, Irbanwil II pada Inspektorat Kabupaten Lamongan mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp. 290.000.000 yang digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) Kegiatan dengan 4 (empat) Sub Kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 2.4.8

Program Yang Mendukung Sasaran Strategis Irbanwil II pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 96.667.000	
	JUMLAH	Rp. 96.667.000	

Tabel 2.4.9

Perjanjian Kinerja Irbanwil III pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya pelaksanaan program pengawasan yang sesuai dengan Rencana Program Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan	85%
Terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah III dan Memastikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai rekomendasi	Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah III	85%
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan selesai pada wilayah III	85%

Terlaksananya Pendampingan BPK RI	Persentase Rekomendasi BPK RI yang ditindaklanjuti	80%
Menindaklanjuti rekomendasi TP-TGR APIP dan BPK RI	Persentase Rekomendasi TP-TGR APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	80% & 30%

Indikator kinerja Individu Irbanwil III pada Inspektorat Tahun 2021 terdiri dari 5 (lima) indikator antara lain :

1. Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan, dimana yang diukur dari pelaksanaan program pengawasan yang dilaksanakan yang sesuai dengan jadwal rencana pengawasan
2. Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah III, dimana yang diukur dari Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan sesuai berakhirnya dengan Surat Tugasnya
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan selesai pada wilayah III
4. Persentase Rekomendasi BPK RI yang ditindaklanjuti
5. Persentase Rekomendasi TP-TGR APIP dan BPK yang ditindaklanjuti

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2021, Irbanwil I pada Inspektorat Kabupaten Lamongan mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp. 290.000.000 yang digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) Kegiatan dengan 4 (empat) Sub Kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 2.4.9

Program Yang Mendukung Sasaran Strategis Irbanwil III pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 96.667.000	
	JUMLAH	Rp. 96.667.000	

Tabel 2.4.10

Perjanjian Kinerja Irbanwil IV pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA SI PENGHITUNGAN	TARGET
Meningkatnya pelaksanaan program pengawasan yang sesuai dengan Rencana Program Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan	(Jumlah Pelaksanaan Program Pengawasan yang tepat waktu:Jumlah Program Pengawasan)x 100%	85%
Terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah IV dan Memastikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai rekomendasi	Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah IV	(Jumlah Terbit LHP PD tepat waktu : Jumlah PD yang diperiksa) X 100%	85%
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan selesai pada wilayah IV	(Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi selesai:Jumlah Rekomendasi)x100%	85%
	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti pada wilayah IV	(jumlah Pegaduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti:Jumlah Pengaduan Masyarakat yang masuk)x100%	100%
Terlaksananya pendampingan, SPIP, PMPRB, Benturan Kepentingan, WBS, SP4N dan Kapabilitas APIP	Jumlah Laporan Pendampingan	Jumlah Laporan Pendampingan	5 Laporan

Indikator kinerja Individu Irbanwil IV pada Inspektorat Tahun 2021 terdiri dari 5 (lima) indikator antara lain :

1. Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan, dimana yang diukur dari pelaksanaan program pengawasan yang dilaksanakan yang sesuai dengan jadwal rencana pengawasan
2. Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah IV, diukur dari Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan sesuai berakhirnya dengan Surat Tugasnya
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan selesai pada wilayah IV
4. Persentase Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti pada wilayah IV, diukur dari pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sampai selesai.
5. Jumlah Laporan Pendampingan tepat waktu.

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2021, Irbanwil IV pada Inspektorat Kabupaten Lamongan mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp. 560.000.000 yang digunakan untuk melaksanakan dengan 3 (tiga) Kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 2.4.11

**Program Yang Mendukung Sasaran Strategis Irbanwil IV
pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021**

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp.50.000.000	
2.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp.50.000.000	
3.	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Rp.460.000.000	
	JUMLAH	Rp 560.000.000	

Tabel 2.4.12

Perjanjian Kinerja Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET
Tersusunnya program kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen Program Kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen Program Kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang tersusun	1 Dok
Tersusunnya LKjIP, LPPD, LKPJ lingkup Inspektorat;	Persentase penyusunan dokumen pelaporan tahunan tepat waktu.	(Jumlah dokumen pelaporan tahunan tepat waktu : Jumlah Dokumen yang dibuat) X 100%	100%
Tersusunnya Bahan Kerjasama, Penelitian dan Koordinasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Lingkup Inspektorat	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Yang Tersusun	1 Dok
Tersusunnya Bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Yang Tersusun	3 Dokumen
Tersusunnya dokumen SOP dan IKM	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen SOP dan IKM yang Tersusun	2 Dokumen
Terlaksananya tatakelola Keuangan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen RKA dan DPA	2 Dokumen
	Persentase pembayaran gaji tepat waktu	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji Tepat Waktu : Jumlah Laporan Pembayaran Gaji) X 100%	100%
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Tribulanan/Semesteran/Tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Tribulanan/Semesteran/Tahunan yang selesai tepat waktu	12 Bln, 4 Dok, 3 buku dan 3 Buku
Koordinasi Bimtek APIP	Persentase jumlah	(jumlah APIP yang	70%

	APIP yang mendapatkan nilai Post tes 70	mendapatkan nilai Post tes 70 : Jumlah Peserta APIP yang bimtek) x100%	
--	---	--	--

Dalam mendukung tugas dan fungsi Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan memiliki Perjanjian Kinerja dengan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lamongan. Perjanjian tersebut berisi 7 (tujuh) sasaran strategis dan memiliki 9 (Sembilan) Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu:

1. Jumlah Dokumen Program Kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, diukur dari jumlah dokumen program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang tersusun.
2. Persentase penyusunan dokumen pelaporan tahunan tepat waktu, diukur dari jumlah dokumen pelaporan tahunan tepat waktu di bagi jumlah dokumen pelaporan
3. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Yang Tersusun
4. Jumlah Bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja
5. Jumlah Dokumen SOP dan IKM yang Tersusun
6. Jumlah Dokumen RKA dan DPA
7. Persentase pembayaran gaji tepat waktu, diukur dari Jumlah Laporan Pembayaran Gaji Tepat Waktu.
8. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Tribulanan/Semesteran/Tahunan, diukur dengan jumlah laporan keuangan yang tepat waktu.
9. Persentase jumlah APIP yang mendapatkan nilai Post tes 70

Sasaran Strategis itu didukung dengan kegiatan seperti pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.4.13

Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	30.000.000,00	APBD
2.	Evaluasi Kinerja	20.000.000,00	APBD
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.868.271.574,00	APBD
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	20.000.000,00	APBD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran OPD	20.000.000,00	APBD
6.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000,00	APBD
7.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	25.000.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp. 9.043.271.574	

Tabel 2.4.14

Perjanjian Kinerja Kasubag Evaluasi dan Pelaporan

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET
Tersusunnya program Kerja dan Bahan Koordinasi Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Program Kerja	Jumlah Program Kerja yang tersusun	1 Dokumen
Terinventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan	Jumlah LHP dan Resume TLHP	Jumlah LHP dan Resume TLHP	260 LHP dan 260 TLHP

Tersusunnya statistik hasil pengawasan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen statistic hasil pengawasan	1 Dokumen
Tersusunnya bahan penyelenggaraan kerjasama pengawasan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama	1 Dokumen
Tersusunnya telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dibidang evaluasi dan pelaporan	Jumlah surat telaah	Jumlah surat telaah bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dibidang evaluasi dan pelaporan	1 Surat
Terinventarisasi TLHP TPTGR dan BPK RI	Jumlah LHP dan TLHP	Jumlah LHP TPTGR dan TLHP TPTGR dan BPK RI	3 Dokumen

Dalam mendukung tugas dan fungsi Kepala Subbag Evaluasi dan Pelaporan memiliki Perjanjian Kinerja dengan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lamongan. Perjanjian tersebut berisi 8 (delapan) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu:

1. Jumlah program kerja, yang di ukur dengan Jumlah dokumen program kerja yang tersusun
2. Jumlah LHP dan Resume TLHP, yang di ukur dengan jumlah laporanb hasil pemeriksaan dan resume tindak lanjut hasil pemeriksaan yang terhimpun.
3. Jumlah Dokumen, yang di ukur dengan Jumlah Dokumen statistic hasil pengawasan
4. Jumlah Dokumen, di ukur dengan Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama
5. Jumlah surat telaah, di ukur Jumlah surat telaah bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dibidang evaluasi dan pelaporan.
6. Jumlah LHP dan TLHP, diukur dengan Jumlah LHP TPTGR dan TLHP TPTGR dan BPK RI yang terhimpun.

Sasaran Strategis itu didukung dengan kegiatan seperti pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.4.15

Kegiatan yang mendukung sasaran strategis Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	APBD
2.	Reviu Laporan Kinerja	40.000.000,00	APBD
3.	Reviu Laporan Keuangan	40.000.000,00	APBD
4.	Pengawasan Desa	110.000.000,00	APBD
5.	Kerjasama Pengawasan Internal	70.000.000,00	APBD
6.	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	40.000.000,00	APBD
7.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	30.000.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp. 351.000.000,00	APBD

Tabel 2.4.16

Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET
Meningkatnya pengelolaan tata persuratan, tatalaksana dan Kearsipan,	- Jumlah Buku Register Surat Keluar - Jumlah Buku Register Surat Masuk - Jumlah Surat yang terkirim - Jumlah Dokumen yang di arsipkan	-Jumlah Buku Register Surat Keluar -Jumlah Buku Register Surat Masuk -Jumlah Surat yang terkirim -Jumlah Dokumen yang di arsipkan dan di input dalam aplikasi	1 Buah 1 Buah 85 kali 400 berkas
Tersusunnya laporan kepegawaian	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	(Jumlah Laporan Kepegawaian Tepat waktu : Jumlah Laporan Kepegawaian) x 100	100%
Meningkatnya sarana dan prasarana, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan, asset serta ketertiban, keindahan, dan keamanan kantor.	Nilai SKM tingkat kepuasan karyawan terhadap pelayanan administrasi perkantoran, Sarana, prasarana dan K3	Nilai SKM ASN Inspektorat	83
Meningkatnya pengelolaan dan penatausahaan aset	Persentase Aset yang layak Pakai	(Jumlah aset yang layak pakai : total aset yang ada)100%	80%
Tersusunnya Bahan Pengkajian penataan kelembagaan, analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan lingkup Inspektorat	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Anjab	1 dok

Dalam mendukung tugas dan fungsi Kepala Subbag Umum memiliki Perjanjian Kinerja dengan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lamongan. Perjanjian tersebut berisi 5 (lima) sasaran strategis dan memiliki 8 Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu:

1. Melaksanakan tata usaha Umum dan Kearsipan, administrasi perjalanan dinas, surat menyurat dengan indikator :
 - Jumlah Buku Register Surat Keluar diukur dengan menghitung Jumlah Buku Register Surat Keluar yang terdokumentasi.
 - Jumlah Buku Resgister Surat Masuk diukur dengan menghitung Jumlah Buku Register Surat Masuk yang terdokumentasi.
 - Jumlah Surat yang terkirim yang diukur dengan menghitung Surat yang terkirim selama 1 tahun.
 - Jumlah Dokumen yang di arsipkan diukur dengan menghitung Jumlah Dokumen yang di arsipkan yang di input dalam aplikasi
2. Melaksanakan Tata Usaha Administrasi Kepegawaian, peningkatan kompetensi disiplin dengan indicator Persentase Laporan Kepegawaian yang terkirim Tepat Waktu
3. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga dan memelihara keamanan kebersihan dan ketertiban kantor dengan indicator Nilai SKM tingkat kepuasan karyawan terhadap pelayanan administrasi perkantoran, Sarana dan prasarana dan Nilai SKM tingkat kepuasan karyawan terhadap K3L.
4. Meningkatnya pengelolaan dan penatausahaan asset dengan indikator Persentase Aset yang layak Pakai
5. Tersusunnya Bahan Pengkajian penataan kelembagaan, analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan lingkup Inspektorat, dengan indikator Jumlah Dokumen Anjab yang tersusun.

Tabel 2.4.17

Kegiatan yang mendukung sasaran strategis Kasubbag Umum dan Kepegawaian
pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Penyediaan komponen listrik/Penerangan Bangunan kantor	15.000.000,00	APBD
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan	197.569.500,00	APBD
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000,00	APBD
4.	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	90.000.000,00	APBD
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000,00	APBD
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	APBD
7.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	164.126.000,00	APBD
8.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	APBD
9.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	356.348.000,00	APBD
10.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	APBD
11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00	APBD
12.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.000.000,00	APBD
13.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp. 1.371.043.500,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Inspektorat Kabupaten Lamongan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan perlu dinilai secara terukur tingkat keberhasilannya. Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Renja Tahun 2021, sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1. Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian

indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Inspektorat Kabupaten Lamongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Renja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Inspektorat Kabupaten Lamongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Perangkat Daerah melalui Keputusan Inspektur Kabupaten Lamongan tanggal 10 Januari 2021 Nomor : 188/ 40 /Kep/413.201/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021.

1. Pencapaian Kinerja

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Inspektorat Kabupaten Lamongan melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi

keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Lamongan tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

TABEL 3.1
PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN TAHUN 2021
PADA INSPEKTORAT KAB. LAMONGAN

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan	Persentase OPD yang tidak terdapat temuan material /keuangan	95%	96,05%	101,11%
	Opini Pemeriksa Eksternal	WTP	WTP	100%
	Nilai Maturitas SPIP Kabupaten	Level 3	Level 3	100%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Tujuan Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1. Persentase OPD yang tidak terdapat temuan material /keuangan. Indikator ini tercapai dengan kategori **sangat berhasil** yaitu 96,05% dari target 95% dengan capaian kinerja 101,11%. Keberhasilan indikator ini dikarenakan peran serta obyek pemeriksaan yang telah mempertanggungjawabkan Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Daerah.
2. Opini Pemeriksa Eksternal Indikator ini tercapai dengan kategori **sangat berhasil** yaitu WTP dari target WTP dengan capaian kinerja 100%. Keberhasilan indikator ini dikarenakan peran serta obyek pemeriksaan yang telah membuat Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SAP dan mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Daerah.

3. Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Indikator ini tercapai dengan kategori **sangat berhasil** yaitu level 3 dari target level 3 dengan capaian 100%. Keberhasilan ini dikarenakan peran serta OPD sampling yang memenuhi semua indikator SPIP.

TABEL 3.1
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
PADA INSPEKTORAT KAB. LAMONGAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan kinerja Perangkat Daerah.	Persentase Tindaklanjuti Rekomendasi APIP selesai	87%	98,36%	113,05%
	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase PD dengan katagori Nilai Evaluasi SAKIP minimal B	100%	100%	100%
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Selesai	80%	88,90%	111,12%
	Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP Level 2/Berkembang	5	15	300%
	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1. Persentase Tindaklanjuti Rekomendasi APIP selesai, Indikator ini tercapai dengan katagori **sangat berhasil** yaitu 98,36% dari target 87% dengan capaian kinerja 113,05%. Indikator ini didukung oleh 3 (tiga) Kegiatan yaitu Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah; Pengawasan Desa dan Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP. Keberhasilan Indikator ini dikarenakan peran tim TLHP aktif dalam penagihan TLHP

kepada Obyek Pemeriksaan baik melalui surat maupun panggilan langsung yang belum menyelesaikan tindaklanjut hasil pemeriksaan dan Obyek Pemeriksaan juga kooperatif dalam menyelesaikan tindaklanjut hasil pemeriksaan.

2. Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti ini tercapai dengan katagori **sangat berhasil** dengan realisasi 100% target 100%. Indikator ini didukung 1 (satu) Kegiatan yaitu Pengawasan dengan tujuan tertentu. Keberhasilan indicator ini dikarenakan optimalisasi peran APIP dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Kabupaten Lamongan. Inspektorat Kabupaten Lamongan menangani pengaduan masyarakat terkait dengan kinerja pemerintah guna terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dan telah dilakukan pemeriksaan dan penanganan sebanyak 26 dumas dari target 20 dumas, dengan rincian:

1. Yang masuk Inspektorat sebanyak 9 dumas
2. Pelimpahan dari Setda Kab. Lamongan sebanyak 1 dumas
3. Pelimpahan dari kepolisian sebanyak 9 dumas
4. Pelimpahan dari Kejaksaan sebanyak 7 dumas

Adapun kegiatan penunjang dari indicator ini yaitu Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi yang berupa sosialisasi dan pencerahan produk-produk hukum terkait dengan penegakan aturan dan percepatan pemberantasan korupsi di Kabupaten Lamongan, yang bekerjasama dengan Polres Lamongan dan Kejaksaan Negeri Lamongan, Tim Sapu Bersih Pungli dan Verifikasi LHKASN.

3. Persentase PD dengan katagori Nilai Evaluasi SAKIP minimal B. Indikator ini tercapai dengan katagori **sangat berhasil** yaitu 100 % dari target 100% dengan capaian yaitu 100%. Indikator ini didukung oleh 2 (dua) Kegiatan yaitu Reviu Laporan Kinerja dan Reviu Laporan Keuangan. Keberhasilan pencapaian indikator ini dikarenakan peran serta Kepala PD dalam meningkatkan kinerjanya dan tak henti-hentinya Tim SAKIP Kabupaten memberikan arahan, desk dan evlausi kinerja di semua OPD.
4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Selesai, tercapai dengan katagori **sangat berhasil** dengan realisasi yaitu 88,90% dari target 80%, dan capaian kinerja 111,12%.

Keberhasilan ini dikarenakan adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja dan optimalisasi tindak lanjut rekomendasi BPK dengan koordinasi yang baik antara Tim dengan Obrik yang bersangkutan sehingga temuan BPK dapat diselesaikan sesuai dengan target yang direncanakan.

5. Jumlah PD dengan tingkat maturitas SPIP level 2/berkembang, Indikator ini tercapai dengan katagori **sangat berhasil** yaitu 15 PD dari target 5 PD dengan capaian kinerja 300%. Indikator ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yaitu Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas. Keberhasilan indikator ini dikarenakan adanya pendampingan dari auditor kepada OPD. Untuk tahun akan datang akan di bentuk tim asesor di masing-masing OPD untuk melakukan penilaian mandiri.
6. Level Kapabilitas APIP, indikator ini tercapai dengan katagori sangat berhasil yaitu mencapai level 3 dari target level 3 dengan capaian 100%. Indikator ini didukung oleh 7 (tujuh) Kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Kerjasama Pengawasan Internal; Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan; Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan; Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah; Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB; dan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi. Keberhasilan indikator ini dikarenakan kerja keras APIP untuk memenuhi indikator-indikator yang ada di Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dan adanya pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

TABEL 3.1.1
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PEJABAT PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021

JABATAN	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Sekretaris	Terwujudnya Pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	90%	100%	111,11 %	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.50.000.000	Rp. 44.942.000	89,88%
		Persentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani dengan Baik	83%	83,69 %	100,83 %	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 8.908.271.574	Rp.8.455.169.640	94,91%
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 462.569.500	Rp.446.476.863	96,52%
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Rp.535.474.000	Rp.466.923.865	87,20%

		Persentase sarana pasarana aparatur dengan kondisi baik	85 %	99,97 %	117,61 %	Pemerintah an Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Rp.373.000.000	Rp.323.348.377	86,69%
	Meningkatnya Profesionalisme aparatur pengawasan	% APIP yang mendapatkan sertifikat dalam mengikuti bimtek/diklat substansial dan fungsional dengan nilai di atas 70	80%	88,46%	104,07 %	Administrasi Kepegawai an Perangkat Daerah	Rp.60.000.000	Rp.28.560.100	47,60%
Irbab I	Meningkatnya pelaksanaan program pengawasan yang sesuai dengan Rencana Program Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan	85%	100%	117,65 %	Penyelengga raan Pengawasan Internal	Rp. 96.666.000	Rp.64.515.900	66,74%
	Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan	Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah I	85%	100%	117,65 %				

	urusan pemerintahan daerah pada wilayah I dan Memastikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai rekomendasi	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan selesai pada wilayah I	85%	99,10%	116,59 %				
	Melaksanakan Pendampingan BPKP Perwakilan Prov. Jatim	Jumlah Laporan Pendampingan dari BPKP tepat waktu.	2 Lap	2 Lap	100%				
Urban II	Meningkatnya pelaksanaan program pengawasan yang sesuai dengan Rencana Program Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan	85%	100%	117,65 %	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 96.667.000	Rp.64.515.900	66,74%
	Terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah II dan Memastikan Tindak Lanjut Hasil	Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah II	85%	100%	117,65 %				
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil	85%	100%	117,65 %				

	Pemeriksaan sesuai rekomendasi	Pengawasan selesai pada wilayah II							
	Tertindakannya Pendampingan Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Jumlah Laporan Pendampingan tepat waktu	2 Laporan	2 Laporan	100%				
Urban III	Meningkatnya pelaksanaan program pengawasan yang sesuai dengan Rencana Program Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan	85%	100%	117,65 %	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 96.667.000	Rp. 64.516.015	66,74%
	Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah III dan Memastikan Tindak Lanjut Hasil	Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah III	85%	100%	117,65 %				
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan selesai pada	85%	100%	117,65 %				

		wilayah III							
	Terlaksananya Pendampingan BPK RI	Persentase Rekomendasi BPK RI yang ditindaklanjuti	80%	88,90%	111,12 %				
	Menindaklanjuti rekomendasi TP-TGR APIP dan BPK RI	Persentase Rekomendasi TP-TGR APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	80% & 30%	100% & 35,99%	125% & 119,96%				
Irbab IV	Meningkatnya pelaksanaan program pengawasan yang sesuai dengan Rencana Program Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan	85%	100%	117,65 %	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp.50.000.000	Rp.10.677.000	21.35%
	Terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah IV dan Memastikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah IV	85%	100%	117,65 %				
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%				

	sesuai rekomendasi	pada wilayah IV							
	Terlaksananya pendampingan, SPIP, PMPRB, Benturan Kepentingan, WBS, SP4N dan Kapabilitas APIP	Jumlah Laporan Pendampingan	5 Laporan	5 Laporan	100%	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp.50.000.000	Rp.17.613.400	35,45%
						Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Rp.460.000.000	Rp.371.181.100	80,69%
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Tersusunnya program kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen Program Kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1 Dok	1 Dok	100%				
	Tersusunnya LKjIP, LPPD, LKPJ lingkup Inspektorat;	Persentase penyusunan dokumen pelaporan tahunan tepat	100%	100%	100%	Evaluasi Kinerja PD	Rp.20.000.000	Rp.17.325.000	86,63%

		waktu.							
	Tersusunnya Bahan Kerjasama, Penelitian dan Koordinasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Lingkup Inspektorat	Jumlah Dokumen	1 Dok	1 Dok	100%	Kerjasama Pengawasan Internal	Rp. 70.000.000	Rp. 46.019.500	65,74%
	Tersusunnya Bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Rp.30.000.000	Rp. 27.617.000	92,06%
	Tersusunnya SOP dan IKM	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%				
	Meningkatnya tatakelola Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	4 Dokumen	200%	Evaluasi Kinerja PD	Rp.30.000.000	Rp.27.617.000	92,06%

		Persentase pembayaran gaji tepat waktu	100%	100%	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.8.868.271.574	Rp. 8.418.449.780	94,93%
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Tribulan/Semesteran/Tahunan	12 Bln, 4 Dok, 3 buku dan 3 Buku	12 Bln, 4 Dok, 3 buku dan 3 Buku	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	Rp. 20.000.000	Rp. 16.734.910	83,67%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulan/Semesteran OPD	Rp.20.000.000,00	Rp. 19.984.950,00	19,92%
	Terlaksananya Bimtek APIP	Persentase jumlah APIP yang mendapatkan nilai Post tes 70	70%	86,6%	123,71 %	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000,00	28.560.100,00	47,60%
Kasubbag Evaluasi dan	Tersusunnya program Kerja dan Bahan Koordinasi	Jumlah Program Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100%				

Pelaporan	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan								
	Terinventarisasi hasil pengawasan dan tindakan lanjut hasil pengawasan	Jumlah LHP dan Resume TLHP	260 LHP & 260 TLHP	295 LHP & 295 TLHP	100%	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Rp. 40.000.000,00	Rp. 34.219.500,00	96,88%
	Tersusunnya statistik hasil pengawasan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pengawasan Desa	Rp. 210.000.000	Rp. 146.509.765	69,76%
	Tersusunnya bahan penyelenggaraan kerjasama pengawasan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kerjasama Pengawasan Internal	Rp. 70.000.000,00	Rp. 46.019.500,00	42,97%
	Tersusunnya telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dibidang evaluasi dan	Jumlah surat telaah	1 surat telaah	1 surat telaah	100%				

	pelaporan								
	Terinventarisasi TLHP TPTGR dan BPK RI	Jumlah LHP dan TLHP	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Rp.30.000.000,00	Rp. 17.071.500,00	56,91%
Kasubbag umum	Meningkatnya pengelolaan tata persuratan, tatalaksana dan Kearsipan,	- Jumlah Buku Register Surat Keluar	1 1 Buah	1 Buah	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.462.569.500	Rp. 446.476.863	96,52%
		- Jumlah Buku Register Surat Masuk	1 Buah	1 Buah	100%				
		- Jumlah Surat yang terkirim	85 kali	85 kali	100%				
		- Jumlah Dokumen yang di arsipkan	400 berkas	400 berkas	100%				
	Terdokumentasi kan Administrasi perjalanan Dinas , Keprotokolian, urusan hubungan masyarakat	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Inspektorat	83%	83,69%	100,83 %				

Meningkatnya sarana dan prasarana, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan, asset serta ketertiban, keindahan, dan keamanan kantor.	Nilai SKM tingkat kepuasan karyawan terhadap pelayanan administrasi perkantoran, Sarana, prasarana dan K3	83	83,69%	100,83 %	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Rp. 908.474.000	Rp. 790.272.242	86,98%
Meningkatnya pengelolaan dan penatausahaan aset	Persentase Aset yang layak Pakai	80%	91,78%	122,37 %				
Tersusunnya Bahan Pengkajian penataan kelembagaan, analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan lingkup Inspektorat	Jumlah Dokumen	1 dok	1 dok	100%	Administrasi Kepegawai an Perangkat Daerah	Rp.60.000.000	Rp. 28.560.1000	47,60%

	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100%	100%	100%				
--	--	--	------	------	------	--	--	--	--

3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

Untuk melaksanakan Misi "**Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik** ", ditetapkan 1 (satu) tujuan yaitu **Meningkatnya efektivitas fungsi pengawasan Perangkat Daerah** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, Peran utama pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut berupa pelayanan administratif maupun pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Untuk mendukung tugas pelayanan tersebut, perlu didukung dengan keberadaan pemerintahan yang baik dan bersih. Pemerintahan yang baik dalam hal manajemen pengelolaannya dan bersih dari sisi pelaksana aparatumnya. Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator sebagai berikut :

Tabel.3.2.1
Tujuan dan Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	satuan	Target					Realisasi				2021		
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	target	realisasi	Capaian
Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan	Persentase OPD yang tidak terdapat temuan material /keuangan	%	80%	83%	86%	90%	95%	84,61%	96,92%	93,85%	94,7%	95%	96,05%	101,11%
	Opini Pemeriksa Eksternal	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	100%
	Nilai Maturitas SPIP Kabupaten	Level	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	100%

Dari Tabel diatas pada tahun 2021, indikator Kinerja Persentase OPD yang tidak terdapat temuan material /keuangan sebanyak 96,05 % dari target 95% dengan capaian 101,11%, Indikator Kinerja Opini Pemeriksaan Eksternal BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan target yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemerintah Kabupaten Lamongan mencapai opini WTP dari BPK RI, dikarenakan kerja keras Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI. Sedangkan untuk indikator Nilai Maturitas SPIP Kabupaten terealisasi level 3 dari target level 3.

Indikator Kinerja Persentase OPD yang tidak terdapat temuan material /keuangan Pada tahun 2021 terdapat kenaikan capaian kinerja apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2020, hal ini disebabkan Perangkat Daerah telah menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.

Tabel.3.2.2
Sasaran dan Indikatornya

asasan Strategis	Indikator Kinerja	TARGET					REALISASI				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tindaklanjuti Rekomendasi selesai	79%	82%	83%	85%	87%	83,93%	97,99%	98%	98,28%	98,36%
	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase PD dengan katagori Nilai Evaluasi SAKIP minimal B	72%	75%	80%	90%	100%	81,97%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Selesai	55%	65%	70%	75%	80%	73,04%	70%	87,25%	90,65%	88,90%
	Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP Level 2/Berkembang	3	4	4	4	5	4	10	20	20	15
	Level Kapabilitas APIP	0	0	2	3	3	0	0	2	3	3

Dari Tabel diatas pada Tahun 2021, dapat dijelaskan Bahwa:

1. Persentase Tindaklanjuti Rekomendasi APIP selesai dari tahun 2017 s/d Tahun 2021 telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Indikator ini didukung dengan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala; Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH; Evaluasi Tindaklanjuti Pemeriksaan; Pencanangan Zona Integritas; Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi, Verifikasi Laporan RAD PPK dan penyelenggaraan pengawasan internal.
2. Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dari tahun 2017 s/d Tahun 2021 telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Indikator ini didukung dengan kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya, Pelaksanaan Saber Pungli, Koordinasi Monitoring, Evaluasi, Verifikasi LHKASN dan pengawasan dengan tujuan tertentu.
3. Persentase PD dengan katagori Nilai Evaluasi SAKIP minimal B dari tahun 2016 s/d Tahun 2021 telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Indikator ini didukung dengan kegiatan Review RKA Dan RKA Perubahan (koordinasi Pengawasan yang lebih Komperenhensif), Evaluasi SAKIP, Review Laporan Keuangan Daerah dan review laporan kinerja.
4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Selesai dari tahun 2017 s/d Tahun 2021 telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Indikator ini didukung dengan kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan dan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah.
5. Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP Level 2/Berkembang dari tahun 2017 s/d Tahun 2021 telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Indikator ini didukung dengan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pendampingan dan Asistensi.
6. Level Kapabilitas APIP dari tahun 2017 s/d Tahun 2021 telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Indikator ini didukung dengan kegiatan Latihan pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (Pengelolaan Keuangan Daerah) dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

3.3. Analisis penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan 2021

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara:

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 serta analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara

rinci dapat dilihat sebagai berikut :

SASARAN	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan kinerja Perangkat Daerah.
----------------	---

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui (lima) indikator kinerja yaitu Persentase Tindaklanjuti Rekomendasi APIP selesai, Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti, Persentase PD dengan katagori Nilai Evaluasi SAKIP minimal B, Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Selesai dan Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP Level 2 /Berkembang dan level kapabilitas APIP, dimana dalam upaya pencapaian didukung oleh 4 (empat) kebijakan, 2 (satu) Program, 4 (empat) Kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan dengan 6 (enam) indikator yaitu:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Tindaklanjuti Rekomendasi APIP selesai	87%	98,36%	113,05%
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Persentase PD dengan katagori Nilai Evaluasi SAKIP minimal B	100%	100%	100%
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Selesai	80%	88,90%	111,12%
Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP Level 2/Berkembang	5	15	300%
Level Kapabilitas APIP	3	3	100

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1. Persentase Tindaklanjuti Rekomendasi APIP selesai, Indikator ini tercapai dengan katagori **sangat berhasil** yaitu 98,36% dari target 87% dengan capaian kinerja 113,05%. Indikator ini didukung oleh 3 (tiga) Sub Kegiatan. Keberhasilan indikator ini dikarenakan peran serta obyek pemeriksaan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan optimalisasai penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik melalui Surat permintaan penyelesaian tindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan

maupun Surat panggilan langsung kepada Obyek Pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

2. Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti ini tercapai dengan kategori **sangat berhasil** dengan realisasi 100% target 100%. Indikator ini didukung 1 (satu) Sub Kegiatan. Keberhasilan indikator ini dikarenakan optimalisasi peran APIP dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Kabupaten Lamongan maupun Instruksi dari Bupati Lamongan. Inspektorat Kabupaten Lamongan menangani pengaduan masyarakat pengaduan masyarakat terkait dengan kinerja pemerintah maupun pengaduan masyarakat sekitar guna terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dan telah dilakukan pemeriksaan dan penanganan sebanyak 26 dumas dari target 20 dumas, dengan rincian:

1. Yang masuk Inspektorat sebanyak 9 dumas
2. Pelimpahan dari Setda Kab. Lamongan sebanyak 1 dumas
3. Pelimpahan dari kepolisian sebanyak 9 dumas
4. Pelimpahan dari Kejaksaan sebanyak 7 dumas

Adapun kegiatan penunjang dari indikator ini yaitu kegiatan Koordinasi dan Monitoring yang berupa sosialisasi dan pencegahan hukum terkait dengan penegakan aturan dan percepatan pemberantasan korupsi di Kabupaten Lamongan, yang bekerjasama dengan Polres Lamongan dan Kejaksaan Negeri Lamongan, Pelaksanaan Sapu Bersih Pungli dan Verifikasi LHKASN.

3. Persentase PD dengan kategori Nilai Evaluasi SAKIP minimal B. Indikator ini tercapai dengan kategori **sangat berhasil** yaitu 100 % dari target 100% dengan capaian yaitu 100%. Keberhasilan pencapaian indikator ini dikarenakan peran serta kepala PD yang meningkatkan kinerjanya.
4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Selesai tercapai dengan kategori **sangat berhasil** dengan realisasi yaitu 88,90% dari target 80%, sehingga capaian kinerja 111,12%. Keberhasilan ini dikarenakan adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja dan optimalisasi Tim Tindak lanjut rekomendasi BPK untuk

berkoordinasi dengan Obrik yang bersangkutan sehingga temuan BPK dapat diselesaikan sesuai dengan target yang direncanakan.

5. Jumlah PD dengan tingkat maturitas SPIP level 2/berkembang, Indikator ini tercapai dengan kategori **sangat berhasil** yaitu 15 PD dari target 5 PD dengan capaian kinerja 300%. 15 OPD ini sampling penilaian maturitas SPIP level 3 (terdefinisi). Indikator ini didukung oleh 1 (satu) Sub Kegiatan. Keberhasilan indikator ini dikarenakan adanya pendampingan dari auditor kepada OPD.
6. Level Kapabilitas APIP Indikator ini tercapai dengan kategori **sangat berhasil** yaitu level dari target level 3 dengan capaian kinerja 100%. Indikator ini didukung oleh 7 (tujuh) Sub Kegiatan. Keberhasilan indikator ini dikarenakan adanya pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Peran Aktif APIP.

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (SDM, Dana dan Sarana dan Prasarana)

Untuk mewujudkan peran APIP yang efektif dalam mengawal penyelenggaraan pengawasan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan diperlukan dukungan antara lain pemenuhan kecukupan auditor untuk melaksanakan tugas pengawasan sekurang-kurangnya 40 Auditor mengingat luasnya jangkauan wilayah pengawasan dan banyaknya jumlah Obyek Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan, akan tetapi hingga saat ini masih berjumlah 27 orang, sehingga masih terdapat kekurangan auditor sebanyak 13 orang.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-PD maupun Standart Operasional Prosedur (SOP) guna memberikan kelancaran dalam melayani masyarakat.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp.11.379.315.074 telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar

Rp. 10.455.750.660 atau 91,88%, sisa dana sebesar Rp. 923.564.414 atau 8,12% yang merupakan SILPA di Kas Daerah. Adapun alokasi per sasaran pembangunan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

TABEL. 3.3.1
ALOKASI PER SASARAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan kinerja Perangkat Daerah.	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP selesai	235.000.000	170.729.265	72,65%
	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	50.000.000	10.677.000	21,35%
	Persentase PD dengan katagori Nilai Evaluasi SAKIP minimal B	80.000.000	47.038.050	58,80%
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Selesai	45.000.000	27.071.500	60,16%
	Jumlah PD dengan tingkat maturitas SPIP level 2/Berkembang	120.000.000	73.617.000	61,35%
	Level Kapabilitas APIP	520.000.000	389.757.100	74,95%

TABEL. 3.3.2
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sasaran	Indikator	%Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	%Tingkat Efisiensi
Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan kinerja Perangkat Daerah.	Persentase Tindak lanjut Rekomendasi APIP selesai	113,05%	72,65%	40,5%
	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	21,35%	78,65%
	Persentase PD dengan katagori Nilai Evaluasi SAKIP minimal B	100%	58,80%	41,20%
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Selesai	111,12%	60,16%	50,96%
	Jumlah PD dengan tingkat maturitas SPIP level 2/Berkembang	300%	61,35%	38,65%
	Level Kapabilitas APIP	100%	74,95	25,05%

Dari Tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan telah dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi dan tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan pada tahun 2021.

3.5 Analisa Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021 yang di breakdown ke dalam 2 (dua) Program dengan 4 (empat) kegiatan dan 1 (satu) Program Penunjang dengan 6 (enam) kegiatan, semuanya merupakan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan serta indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Penyesuaian Indikator Inspektorat Kabupaten Lamongan dengan 1 sasaran dan 5 (lima) indikator yaitu; Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP selesai, Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti, Persentase PD dengan katagori Nilai Evaluasi SAKIP minimal B, Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Selesai dan Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP Level 2 / Berkembang, di mana program dan kegiatan tersebut bersumber dari Program Nasional serta mengacu pada kaedah-kaedah perencanaan kegiatan. Dalam mencapai keberhasilan tersebut Inspektorat Kabupaten Lamongan menghadapi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam bidang pengawasan yaitu semakin banyaknya mandatory baik dari KPK, Pemerintah Pusat dan BPKP, serta Kurangnya SDM pengawasan (Auditor) baik dari segi kualitas maupun kuantitas mengingat luasnya jangkauan wilayah pengawasan dan banyaknya jumlah Obyek Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan.

Solusi

Diupayakan meningkatkan kualitas SDM Inspektorat Kabupaten Lamongan melalui pembinaan dan motivasi agar terus meningkatkan kompetensinya, sering membaca dan memahami ketentuan perundang-undangan, mengikuti workshop, seminar, bimtek, pelatihan uji kopetensi sehingga terbentuk aparatur pengawasan yang tangguh, handal dan professional. Selain itu juga mengupayakan penambahan personil APIP maupun staf operasional, baik melalui perekrutan CPNS maupun pelimpahan jabatan.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat, selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan, dengan cara peningkatan kapabilitas APIP dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan lebih optimal.

3.6. Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2021

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Akuntabilitas keuangan merupakan sarana pengukuran dalam alokasi dana yang mendukung pencapaian sasaran dengan indikator sasaran program dan pencapaian kegiatan dengan indikator kinerja, meliputi output dan outcome.

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan sasaran indikator, dengan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.11.379.315.074 dan terealisasi sebesar Rp.10.455.750.660 atau 91,88%, sisa dana sebesar Rp.923.564.414 atau 8,12%%, adapun rinciannya sebagaimana berikut:

Tabel 3.2

Data Realisasi Keuangan Tahun 2021

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
	INSPEKTORAT	11.379.315.074,00	10.455.750.660,00	91,88
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.389.315.074,00	9.765.420.845,00	93,99
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	44.942.000,00	89,88
	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	30.000.000,00	27.617.000,00	92,06
	Evaluasi Kinerja PD	20.000.000,00	17.325.000,00	86,63
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.908.271.574,00	8.455.169.640,00	94,91
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.868.271.574,00	8.418.449.780,00	94,93
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	20.000.000,00	16.734.910,00	83,67
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran OPD	20.000.000,00	19.984.950,00	99,92
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000,00	28.560.100,00	47,60
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000,00	28.560.100,00	47,60
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	462.569.500,00	446.476.863,00	96,52
	Penyediaan komponen listrik/Penerangan Bangunan kantor	15.000.000,00	14.000.000,00	93,33
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan	197.569.500,00	190.305.073,00	96,32
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000,00	44.998.500,00	100,00
	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000,00	14.907.500,00	99,38

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	92.265.790,00	92,27
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	535.474.000,00	466.923.865,00	87,20
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	164.126.000,00	135.264.727,00	82,42
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	12.800.000,00	85,33
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	356.348.000,00	318.859.138,00	89,48
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373.000.000,00	323.348.377,00	86,69
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	19.482.300,00	71,93
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00	61.829.077,00	77,29
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.000.000,00	17.950.000,00	99,72
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000,00	224.087.000,00	89,63
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	480.000.000,00	301.535.315,00	62,82
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	400.000.000,00	273.786.815,00	68,45
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	99.239.265,00	99,24
	Reviu Laporan Kinerja	40.000.000,00	21.198.700,00	53,00
	Reviu Laporan Keuangan	40.000.000,00	25.839.350,00	64,60
	Pengawasan Desa	110.000.000,00	47.270.500,00	42,97
	Kerjasama Pengawasan Internal	70.000.000,00	46.019.500,00	65,74

	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	40.000.000,00	34.219.500,00	85,55
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	80.000.000,00	27.748.500,00	34,69
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	30.000.000,00	17.071.500,00	56,91
	Pengawasan dengan tujuan tertentu	50.000.000,00	10.677.000,00	21,35
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	510.000.000,00	388.794.500,00	76,23
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	50.000.000,00	17.613.400,00	35,23
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	25.000.000,00	13.113.400,00	52,45
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	25.000.000,00	4.500.000,00	18,00
2	Pendampingan dan Asistensi	460.000.000,00	371.181.100,00	80,69
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	250.000.000,00	222.990.000,00	89,20
	Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB	40.000.000,00	33.318.100,00	83,30
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi	50.000.000,00	41.256.000,00	82,51
	Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	120.000.000,00	73.617.000,00	61,35

Catatan:

	Program
	Kegiatan

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Lamongan menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran dengan indikator Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP selesai, Presentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti, Persentase PD dengan katagori Nilai Evaluasi SAKIP minimal B, Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Selesai, Jumlah PD dengan tingkat maturitas SPIP level 2/Berkembang dan Level Kapabilitas APIP dengan nilai capaian lebih dari 100% atau interpretasi memuaskan.

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 telah melaksanakan sasaran indikator, dengan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 11.379.315.074 dan terealisasi sebesar Rp. 10.455.750.660 atau 91,88%, sisa dana sebesar Rp. 923.564.414 atau 8,12%.

Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan adalah 156,46% dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal di sebabkan sesuai dengan peraturan presiden tentang anggaran APIP yang sebesar 0,5% dari APBD, sehingga pagu indikatif bertambah setiap tahunnya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Lamongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lamongan.

4.1 Saran

Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian Kinerja sasaran merupakan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang perlu dicermati guna peningkatan kinerja dimasa mendatang. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan program secara optimal melalui pendekatan pemberdayaan dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki dan tentunya perencanaan yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan sumberdaya manusia (baik kualitas dan kuantitas), sarana dan prasarana, serta program kerja yang baik harus lebih ditingkatkan lagi.

Lamongan, Januari 2022

INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN

Drs. HERU PRANOTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620805 198903 1 010

MATRIK RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021

VISI : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing

MISI : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.

TUJUAN : Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

INDIKATOR TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2015	TARGET 2						KONDISI AKHIR
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Persentase OPD yang tidak terdapat temuan material /keuangan	Temuan material ditentukan OPD yang mendapat temuan material minimal 1/1000 dari jumlah anggaran Kegiatan OPD. (Jumlah OPD yang tidak Mendapatkan Temuan Material/Keuangan:Jumlah OPD) X 100%	75%	77%	80%	83%	86%	90%	95%	95%
Opini Pemeriksa Eksternal	Hasil Opini Eksternal	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Maturitas SPIP Kabupaten	Level Maturitas	0	1	2	2	3	3	3	3

SASARAN	Indikator		Formula	Kondisi Awal 2015	Target						KONDISI AKHIR
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan kinerja Peangkat Daerah.	1	Persentase Tindakanlanjutan Rekomendasi APIP selesai	(Jumlah Tindakanlanjutan Rekomendasi APIP selesai : Jumlah Rekomendasi APIP) x 100%	75%	77%	79%	81%	83%	85%	87%	87%
	2	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	(Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang ditindaklanjuti : Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Masuk) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3	Persentase PD dengan kategori Nilai Evaluasi SAKIP minimal B	(Jumlah PD kategori hasil Evaluasi SAKIP PD dengan Nilai minimal B: Jumlah PD yang di Evaluasi) x 100%	70%	71%	72%	75%	80%	90%	100%	100%
	4.	Persentase Tindakanlanjutan Rekomendasi BPK Selesai	(Jumlah Tindakanlanjutan Rekomendasi BPK-RI selesai : Jumlah Rekomendasi BPK) x 100%	46%	50%	55%	65%	70%	75%	80%	80%
	5.	Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP Level 2 / Berkembang	Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP Level 2 / Berkembang	0	0	3	4	4	4	5	20

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2021

Instansi: Inspektorat Kabupaten Lamongan

Sasaran			Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Anggaran (Rp.)
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)					
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tindakanjuti Rekomendasi APIP selesai	87%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase Rekomendasi Laporan Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	%	87	480.000.000
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Buku	225	400.000.000
			Sub Kegiatan				
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP	Buku	60	100.000.000
			Pengawasan Desa	Jumlah LHP	Buku	100	110.000.000
			Monitoring dan Evaluasi TLHP APIP	Jumlah Dokumen TLHP BPK RI dan APIP	Resume	180	25.000.000
	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase Rekomendasi Laporan Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	%	87	480.000.000
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah LHP	Buku	20	80.000.000
			Sub Kegiatan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah LHP	Buku	20	50.000.000

	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Selesai	80%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi Laporan Pengawasan BPK yang ditindaklanjuti	%	80	480.000.000
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Buku	225	400.000.000
			Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI	Jumlah Dokumen TLHP BPK RI dan APIP	Resume	180	15.000.000
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah LHP	Buku	20	80.000.000
			Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah LHP	Buku	2	30.000.000
	Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP Level 2 /Berkembang	5 PD	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan Yang Dilegalitaskan	%	60	510.000.000
			Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	OPD	5	460.000.000
			Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Dokumen Penilaian Mandiri Zona Integritas dan Jumlah Peserta Pendampingan dan sistensi Penegakan Integritas	Dok & Orang	1&100	120.000.000
	Presentase PD dengan katagori Nilai Evaluasi	100%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi Laporan Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	%	87	480.000.000

Level kapabilitas APIP	SAKIP minimal B		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Buku	225	400.000.000
			Sub Kegiatan 1. Reviu Laporan Kinerja 2. Reviu Laporan Keuangan	Jumlah LHR	Buku	7	40.000.000
	3			Jumlah LHR	Buku	53	40.000.000
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SKM Inspektorat	%	83	10.389.315.074
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan kepegawaian	Laporan	12	60.000.000
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah peserta bimtek	Orang	50	60.000.000
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase Rekomendasi Laporan Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	%	87	480.000.000
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Buku	225	400.000.000
			Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Lembaga	Lembaga	2	70.000.000
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan Yang Dilegalitaskan	%	60	510.000.000
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan yang difasilitasi terkait pengawasan	Dokumen	1	50.000.000

			Sub Kegiatan				
			1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Perbup yang diterbitkan	Dokumen	1	25.000.000
			2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Peserta Pendampingan dan Asistensi	Orang	200	25.000.000
			Kegiatan				
			Pendampingan dan Asistensi	jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	OPD	5	460.000.000
			Sub Kegiatan				
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta Pendampingan dan Asistensi	OPD	10	250.000.000
			Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB	Jumlah Peserta Pendampingan dan Asistensi RB	Orang	200	40.000.000
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi	Jumlah Peserta sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Orang	175	50.000.000
			Program				
Meningkatnya manajemen Internal PD	Nilai SAKIP Inspektorat Kab. Lamongan	85	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SKM Inspektorat	%	83	10.389.315.074
			Kegiatan				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Laporan	12	8.908.271.574
			Sub Kegiatan				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji tepat waktu	%	90	8.868.271.574
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	Laporan	12	20.000.000

			Keuangan Akhir Tahun OPD				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran OPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan, triwulan dan semesteran	Laporan	18	20.000.000
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa	Laporan	12	462.569.500
			Sub Kegiatan				
			Penyediaan komponen listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/Penerangan Bangunan kantor	Item	12	15.000.000
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Item	17	197.569.500
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang terbeli	Item	35	45.000.000
			Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang Cetak dan penggandaan	Buah & Lembar	2 & 75.000	90.000.000
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan, iklan dan ucapan	Media	9	15.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan dan Minuman dan Jumlah Perjalanan Dinas yang terakomodir	Dus	2.300	100.000.000
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah rekening jasa dibayar tepat waktu	Rekening	5	535.474.000
			Sub Kegiatan				
			Penyediaan Jasa	Jumlah Rekening Jasa	Rekening	5	164.126.000

			Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Terbayar			
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli terhadap kebutuhan pegawai	Item	26	15.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa administrasi dan keuangan; Jumlah Penyedia jasa kebersihan; Jasa keamanan dan jasa Supir	Item	16	356.348.000
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang	Laporan	12	373.000.000
			Sub Kegiatan				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah STNK Kendaraan Roda 2 dan Roda 4	Pajak STNK	26	25.000.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan operasional yang diservice	Unit	7	80.000.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan kantor yang diservice	Item	3	18.000.000
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Unit	1	250.000.000

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

Nama OPD : Inspektorat Kabupaten Lamongan

Sasaran Strategis	Formula	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	5	6	7
Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan kinerja Peangkat Daerah.	(Jumlah Tindakanjutan Rekomendasi APIP selesai : Jumlah Rekomendasi APIP) x 100%	Persentase Tindakanjutan Rekomendasi APIP selesai	87%	98,36%	113,05%
	(Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang ditindakanjuti : Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Masuk) x 100%	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindakanjuti	100%	100%	100%
	(Jumlah PD katagorihasilEvaluasi SAKIP PD denganNilai minimal B:Jumlah PD yang di Evaluasi) x 100%	Persentase PD dengan katagori Nilai Evaluasi SAKIP minimal B	100%	100%	100%
	(JumlahTindakanjutanRekomendasi BPK-RI selesai : JumlahRekomendasi BPK) x 100%	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Selesai	80%	88,90%	111,12%
	Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP Level 2/Berkembang	Jumlah PD dengan tingkat maturitas SPIP level 2/Berkembang	5	15	300%
	Level kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	3	3	100%

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	480.000.000	301.535.315	62,82%
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	510.000.000	388.794.500	76,23%
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.389.315.074	9.765.420.845	93,99%

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan 3 (tiga) program 10 (sepuluh) kegiatan 10 dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.379.315.074 dan terealisasi sebesar Rp. 10.455.750.660 atau 91,88%, sisa dana sebesar Rp. 923.564.414 atau 8,12 %, yang merupakan SILPA di kas Daerah

Lamongan, Januari 2022
 INSPEKTUR
 KABUPATEN LAMONGAN

Drs. HERY PRANOTO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620905 198903 1 010

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KAB. LAMONGAN

- VISI** : "Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing"
- MISI** : " Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik"
- TUJUAN** : Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
- TUGAS** : Inspektorat Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan
- FUNGSI** :
- penetapan petunjuk operasional masing-masing program kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat ;
 - penetapan dan pengendalian Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan masing-masing program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
 - perumusan dan penetapan bahan kebijakan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan dan penilaian terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan desa;
 - penyelenggaraan pemeriksaan reguler berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan non PKPT;
 - penyelenggaraan pengujian terhadap laporan keuangan perangkat daerah;
 - penyelenggaraan pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;

- g. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h. penyelenggaraan pembinaan tenaga fungsional/ pengawasan di lingkungan Inspektorat;
- i. penyelenggaraan koordinasi dan review laporan keuangan daerah sebelum dilakukan oleh BPK dan mengoordinasikan dan mereview Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah AKIP/LAKIP Pemerintah Daerah;
- j. penyelenggaraan pengawasan terhadap dana bantuan atas dasar permintaan;
- k. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas Inspektorat;
- l. pengendalian dan pengesahan laporan keuangan Inspektorat untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan;
- m. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan kinerja Perangkat Daerah.	Persentase Tindakan lanjut Rekomendasi APIP selesai	(Jumlah Tindakan lanjut Rekomendasi APIP selesai : Jumlah Rekomendasi APIP) x 100%	TLHP APIP	Irban 1, 2, 3, 4 dan TIM TLHP APIP
	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	(Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang ditindaklanjuti : Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Masuk) x 100%	TLHP Dumas	Irban I, II, III dan IV serta Auditor

Persentase PD dengan katagori Nilai Evaluasi SAKIP minimal B	(Jumlah PD katagori hasil Evaluasi SAKIP PD dengan Nilai minimal B : Jumlah PD yang di Evaluasi) x 100%	LHE SAKIP PD	Irban I, II, III dan IV serta Auditor
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Selesai	(Jumlah Tindakanjutan Rekomendasi BPK-RI selesai : Jumlah Rekomendasi BPK) x 100%	TLHP BPK	Irban I dan Tim TLHP BPK
Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP Level 2 /Berkembang	Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP Level 2/ Berkembang	Laporan Hasil Evaluasi	Irban I, II, III dan IV serta Auditor
Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	QA BPKP Prov. Jatim	Irban I, II, III dan IV serta Auditor

**PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS INSPEKTORAT
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET
Terwujudnya Pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat	Persentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani dengan Baik	$(\text{Jumlah Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik} : \text{Jumlah Total Unit Kerja yang terlayani}) \times 100\%$	83 %
	Persentase sarana pasarana aparatur dengan kondisi baik	$(\text{Sarana Prasarana dengan kondisi baik} : \text{Jumlah Sarana Prasarana yang ada}) \times 100 \%$	83%
	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	$(\text{Laporan Keuangan atau capaian kinerja yang tepat waktu} : \text{Laporan Keuangan atau capaian kinerja yang dibuat}) \times 100\%$	90%
Meningkatnya Profesionalisme aparatur pengawasan	% APIP yang mendapatkan sertifikat dalam mengikuti bimtek/diklat substansial dan fungsional dengan nilai di atas 70	$(\text{Jumlah APIP yang mendapatkan sertifikat dalam mengikuti bimtek/diklat substansial dan fungsional dengan nilai di atas 70} : \text{Jumlah APIP yang mengikuti bimtek/diklat substansial dan fungsional}) \times 100\%$	80%

**PERJANJIAN KINERJA INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET
Meningkatnya pelaksanaan program pengawasan yang sesuai dengan Rencana Program Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan	(Prosentase Pelaksanaan Program Pengawasan yang tepat waktu:Jumlah Program Pengawasan)x 100%	85%
Terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah I dan Memastikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai rekomendasi	Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah I	(Terbit LHP PD tepat waktu : Jumlah SKPD yang diperiksa) X 100%	85%
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan selesai pada wilayah I	(Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi selesai:Jumlah Rekomendasi)x100%	85%
Terlaksananya Pendampingan BPKP Perwakilan Prov. Jatim	Jumlah Obrik BPKP yang terdampingi	Jumlah Obrik BPKP yang terdampingi	5 Obrik

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET
Meningkatnya pelaksanaan program pengawasan yang sesuai dengan Rencana Program Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan	(Prosentase Pelaksanaan Program Pengawasan yang tepat waktu:Jumlah Program Pengawasan)x 100%	85%
Terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah II dan Memastikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai rekomendasi	Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah II	(Terbit LHP PD tepat waktu : Jumlah SKPD yang diperiksa) X 100%	85%
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan selesai pada wilayah II	(Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi selesai:Jumlah Rekomendasi)x100%	85%
	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti pada wilayah II	(jumlah Pegaduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti:Jumlah Pengaduan Masyarakat yang masuk)x100%	100%
Melaksanakan pendampingan Itwilprov	Jumlah Laporan Pendampingan tepat waktu	Jumlah Laporan Pendampingan tepat waktu	2 Laporan

**PERJANJIAN KINERJA INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET
Menyusun dan mengoordinasi program kerja pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu pada wilayahnya	Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan	(Pelaksanaan Program Pengawasan yang tepat waktu:Jumlah Program Pengawasan)x 100%	85%
Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah III dan Memastikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai rekomendasi	Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah III	(Terbit LHP PD tepat waktu : Jumlah SKPD yang diperiksa) X 100%	85%
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan selesai pada wilayah III	(Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi selesai:Jumlah Rekomendasi)x100%	85%
Melaksanakan Pendampingan BPK RI	Persentase Rekomendasi BPK RI yang ditindaklanjuti	(Jumlah Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti:Jumlah Rekomendasi) x 100%	80%
Menindaklanjuti rekomendasi TP-TGR APIP dan BPK RI	Persentase Rekomendasi TP-TGR APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	(Jumlah Rekomendasi TP-TGR APIP dan BPK yang ditindalanjuti : Jumlah Rekomendasi) x 100%	80% & 30%

**PERJANJIAN KINERJA INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET
Tersusunnya Rencana Program Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan	(Jumlah Pelaksanaan Program Pengawasan yang tepat waktu:Jumlah Program Pengawasan)x 100%	90 %
Terlaksana pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah Irban Investigasi dan Memastikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai rekomendasi	Persentase Terbit LHP tepat waktu pada Irban Investigasi	(Jumlah Terbit LHP PD tepat waktu : Jumlah PD yang diperiksa) X 100%	90 %
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan selesai pada Irban Investigasi	(Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi selesai:Jumlah Rekomendasi)x100%	90 %
	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti pada Irban Investigasi	(jumlah Pegaduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti:Jumlah Pengaduan Masyarakat yang masuk)x100%	100%
Terlaksananya pendampingan, SPIP, PMPRB, Benturan Kepentingan, WBS dan SP4N	Jumlah Laporan pendampingan	Jumlah Laporan pendampingan	5 laporan

**PERJANJIAN KINERJA KASUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN**

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET
Tersusunnya program Kerja dan Bahan Koordinasi Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Program Kerja	Jumlah Program Kerja yang tersusun	1 Dokumen
Terinventarisasi hasil pengawasan dan tindakan lanjut hasil pengawasan	Jumlah LHP dan Resume TLHP	Jumlah LHP dan Resume TLHP	260 LHP dan 260 TLHP
Terlaksananya pengadministrasian dan penyusunan laporan hasil pengawasan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang tersusun	1 Dokumen
Tersusunnya statistik hasil pengawasan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen statistic hasil pengawasan	1 Dokumen
Tersusunnya bahan penyelenggaraan kerjasama pengawasan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama	1 Dokumen
Tersusunnya telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang evaluasi dan pelaporan	Jumlah surat telaah	Jumlah surat telaah	1 Surat
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monitoring	Jumlah laporan monitoring	1 Laporan
Terinventarisasi TLHP TPTGR dan BPK RI	Jumlah LHP dan TLHP	Jumlah LHP TPTGR dan TLHP TPTGR dan BPK RI	3 Dokumen

**PERJANJIAN KINERJAKASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET
Meningkatnya pengelolaan tata persuratan, tatalaksana dan Kearsipan,	-Jumlah Buku Register Surat Keluar -Jumlah Buku Register Surat Masuk -Jumlah Surat yang terkirim -Jumlah Dokumen yang di arsipkan	-Jumlah Buku Register Surat Keluar -Jumlah Buku Register Surat Masuk -Jumlah Surat yang terkirim -Jumlah Dokumen yang di arsipkan dan di input dalam aplikasi	1 Buah 1 Buah 85 kali 400 berkas
Tersusunnya laporan kepegawaian	-Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	(Jumlah Laporan Kepegawaian Tepat waktu : Jumlah Laporan Kepegawaian) x 100	100%
Meningkatnya sarana dan prasarana, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan, asset serta ketertiban, keindahan, dan keamanan kantor.	-Nilai SKM tingkat kepuasan karyawan terhadap pelayanan administrasi perkantoran, Sarana, prasarana dan K3	Nilai SKM ASN Inspektorat	85
Meningkatnya pengelolaan dan penatausahaan aset	-Persentase Aset yang layak Pakai	(Jumlah aset yang layak pakai : total aset yang ada) 100%	80%
Tersusunnya Bahan Pengkajian penataan kelembagaan, analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan lingkup Inspektorat	-Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Anjab	1 dok
Meningkatnya pengelolaan tata persuratan, tatalaksana dan Kearsipan,	-Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap informasi publik	Nilai SKM Kepuasan Pelayanan Inspektorat	80
Tersusunnya laporan kepegawaian	-Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	(Jumlah Laporan Kepegawaian Tepat waktu : Jumlah Laporan Kepegawaian) x 100	100%

**PERJANJIAN KINERJA KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET
Tersusunnya program kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen Program Kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen Program Kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang tersusun	1 Dok
Tersusunnya LKjIP, LPPD, LKPJ lingkup Inspektorat;	Persentase penyusunan dokumen pelaporan tahunan tepat waktu.	(Jumlah dokumen pelaporan tahunan tepat waktu : Jumlah Dokumen yang dibuat) X 100%	100%
Tersusunnya Bahan Kerjasama, Penelitian dan Koordinasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Lingkup Inspektorat	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Yang Tersusun	1 Dok
Tersusunnya Bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Yang Tersusun	2 Dokumen
Melaksanakan Penyusunan SOP dan IKM	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen SOP dan IKM yang Tersusun	2 Dokumen
Terlaksananya tatakelola Keuangan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen RKA dan DPA	2 Dokumen
	Persentase pembayaran gaji tepat waktu	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji Tepat Waktu : (Jumlah Laporan Pembayaran Gaji) X 100%	100%
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Tribulanan/Semesteran/Tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Tribulanan/Semesteran/Tahunan yang selesai tepat waktu	12 Bln, 4 Dok, 3 buku dan 3 Buku
Koordinasi Bimtek APIP	Persentase jumlah APIP yang mendapatkan nilai Post tes 70	(jumlah APIP yang mendapatkan nilai Post tes 70 : Jumlah Peserta APIP yang bimtek) x100%	70%

**PERJANJIAN KINERJA PENGELOLA DATA
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN**

No	Sasaran / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formula	Target
1.	Terhimpunya dokumen perjanjian kerjasama	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja Sama yang terhimpun	1 dok
2.	Tersusunnya telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dibidang evaluasi dan pelaporan	Jumlah surat telaah	Jumlah surat telaah	1 Surat
3.	Tersusunnya resume TLHP	Jumlah resume TLHP	Jumlah Resume TLHP yang tersusun	87 resume

**PERJANJIAN KINERJA PENGEVALUASI PROGRAM DAN KINERJA
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN**

NO.	Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Formulah	Target
1.	Tersedianya Data Perencanaan	Jumlah Rencana Program pengawasan yang tersusun	Jumlah Rencana Program pengawasan yang tersusun	1 Dokumen
		Jumlah Renja dan Renja Perubahan	Jumlah Renja dan Renja Perubahan yang selesai tersusun	1 Dokumen
2.	Tersedianya Laporan Tahunan	Jumlah LKjIP yang tersusun Jumlah LPPD yang tersusun Jumlah LKPJ yang tersusun Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	Jumlah LKjIP yang tersusun Jumlah LPPD yang tersusun Jumlah LKPJ yang tersusun Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen

3	Tersedia dokumen SAKIP	Jumlah Perjanjian Kinerja yang tersusun Jumlah SK Indikator Kinerja Utama Jumlah SK IKI	Jumlah Perjanjian Kinerja yang tersusun Jumlah SK Indikator Kinerja Utama Jumlah SK IKI	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
4	Terentry nya data Kegiatan Inspektorat di aplikasi Sierkel, LPPD dan Elsa	Presentasi keterisian aplikasi Sierkel, LPPD, Elsa	(Jumlah Kegiatan inspektorat yang terentri ke aplikasi sierkel, LPPD dan elsa:jumlah Kegiatan Inspektorat yang ada)x100%	90%

**PERJANJIAN KINERJA PENGELOLA DATA
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN**

No	Sasarn / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formula	Target
1.	Tersusunnya Inventarisasi, resume hasil pengawasan	Jumlah dokumen TLHP	Jumlah Dokumen TLHP yang tersusun	6 dok
2.	Tersusunnya laporan data statistik hasil pengawasan	Jumlah data Statistik hasil pengawasan	Jumlah Dokumen Data Statistik Hasil Pengawasan yang tersusun	1 buku
3.	Tersusunnya dokumen SKM Dumas	Jumlah SKM	Jumlah Dokumen SKM Dumas di Inspektorat yang tersusun	1 LHP
4.	Tersusunnya resume TLHP	Jumlah resume TLHP	Jumlah Resume TLHP yang tersusun	90 resume

**PERJANJIAN KINERJA VERIFIKATOR DAN PENATA DOKUMEN KEUANGAN
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN**

NO.	Sasaran Kerja	Indikator kinerja	Formula	Target
1.	Tersedianya SPP dan SPM	Jumlah SPP dan SPM yang terbit	Jumlah SPP dan SPM yang terbit tepat waktu	220 Dokumen
2.	Laporan Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Bulanan Jumlah Laporan Pajak	Jumlah Laporan Bulanan yang tepat waktu Jumlah Laporan Pajak yang tepat waktu	12 Laporan 12 Laporan
3.	Terlaksananya verifikasi SPJ	Jumlah SPJ yang diverifikasi	Jumlah SPJ yang diverifikasi	220 SPJ
4.	Menyelesaikan Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan	Jumlah Tindak lanjut laporan hasil Pemeriksaan	Jumlah Resume Tindak lanjut laporan hasil Pemeriksaan yang tepat waktu	15 Laporan

**PERJANJIAN KINERJA BENDAHARA PENGELUARAN
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN**

NO	KINERA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	TARGET
1	Terlaksananya tata kelola keuangan	Jumlah tindak pencairan keuangan	Jumlah pencairan keuangan sesuai dengan cash buget	150 Dokumen
2	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan roda 4 yang di servis rutin.	Jumlah Kendaraan Roda 4 yang di servis sesuai jadwal	8 Unit

**PERJANJIAN KINERJA PEMBUAT DAFTAR GAJI
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN**

NO	KINERA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	TARGET
1	Menyiapkan tata kelola Administrasi Gaji dan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah Gaji pegawai yang Harus di bayarkan selama 1 tahun	Jumlah Gaji pegawai yang Harus di bayarkan selama 1 tahun yang tepat waktu	13 Berkas
2	Membuat Tunjangan Penghasilan	Jumlah Laporan Tunjangan pegawai selama 1 tahun	Jumlah Laporan Tunjangan pegawai selama 1 tahun yang tepat waktu	4 berkas
3	Membuat SPP	Jumlah Laporan pengajuan SPM selama 1 Tahun	Jumlah Laporan pengajuan SPM selama 1 Tahun yang tepat waktu	12 Berkas
4	Membuat SPM	Jumlah Laporan Pengajuan SPM Selama 1 Tahun	Jumlah Laporan Pengajuan SPM Selama 1 Tahun yang tepat waktu	12 Berkas
5	Membuat Model DK	Jumlah Laporan Verivikasi Model DK Selama 1 tahun	Jumlah Laporan Verivikasi Model DK Selama 1 tahun yang tepat waktu	1 Berkas
6	SPT Tahunan Pegawai	Jumlah Laporan Verivikasi SPT Selama 1 tahun	Jumlah Laporan Verivikasi SPT Selama 1 tahun yang tepat waktu	1 Berkas
7	Mengelola Data Penataan dan Penilaian Kearsipan	- Jumlah Penerimaan Berkas Arsip Inspektorat Selama 1 tahun yang terkodefikasi - Jumlah berkas yang sudah di simpan di Box Arsip Selama 1 Tahun	- Jumlah Penerimaan Berkas Arsip Inspektorat Selama 1 tahun yang terkodefikasi - Jumlah berkas yang sudah di simpan di Box Arsip Selama 1 Tahun	1.260 Berkas 105 Box Arsip
8	Mengendalikan pemeliharaan dan Penggunaan Roda 4	Jumlah Kendaraan yang dikelolah pada Tahun 2019	Jumlah Kendaraan yang dikelolah pada Tahun 2019	8 Unit

**PERJANJIAN KINERJA PENGADMINISTRASIAN UMUM
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	TARGET
1	Terlaksananya tatakelola administrasi Persuratan	Jumlah Dokumen Surat keluar	Jumlah Dokumen Surat keluar	3504 Dokumen
		Jumlah Dokumen Surat masuk	Jumlah Dokumen Surat masuk	1241 Dokumen
		Jumlah Dokumen agenda kegiatan pimpinan	Jumlah Dokumen agenda kegiatan pimpinan	1150 Dokumen
		Jumlah Kegiatan kelancaran tamu pimpinan;	Jumlah Kegiatan kelancaran tamu pimpinan;	450 Dokumen
		Jumlah informasi Kegiatan kepada seluruh pegawai;	Jumlah informasi Kegiatan kepada seluruh pegawai;	350 Dokumen

**PERJANJIAN KINERJA PENGOLAH DATA PENGAWASAN
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	TARGET
1	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Evaluasi SAKIP	Jumlah Dokumen LHE	Jumlah Dokumen LHE	61 Dok
2	Tersedianya Data Konsep Perda dan Perbup	Jumlah Perda dan Perbup	Jumlah Perda dan Perbup	1 Perda, 1 Perbup
3	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Maturitas SPIp	Jumlah OPD	Jumlah OPD	4 OPD
4	Tersusunnya Resume TLHP dan Inventarisasi TL Pengawasan	Jumlah Resumen TLHP	Jumlah Resumen TLHP	90 Resume

**PERJANJIAN KINERJA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	TARGET
1	Terpenuhi data Administrasi Kepegawaian	Persentase data yang memenuhi syarat kelengkapan data pegawai	$(\text{Jumlah data yang memenuhi syarat kelengkapan data pegawai} ; \text{Jumlah Pegawai}) \times 100\%$	85%
2	Tersedianya Data Konsep Perda dan Perbup	Persentase Laporan Kepegawaian terkirim tepat waktu	$(\text{Jumlah Laporan kepegawaian yang terkirim tepat waktu} : \text{Jumlah Laporan Kepegawaian}) \times 100\%$	90%

**PERJANJIAN KINERJA ADMINISTRASI UMUM
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	TARGET
1	Terselenggaranya koordinasi, pengelolaan data dan penyusunan laporan administrasi umum	Jumlah Notulen rapat	Jumlah Notulen rapat yang dihimpun	20 Dok
		Jumlah file kepegawaian yang dikelola	Jumlah file kepegawaian yang dikelola	41 berkas
		Jumlah Laporan Kegiatan	Jumlah Laporan Kegiatan yang dibuat	12 Laporan Kegiatan

**PERJANJIAN KINERJA PENGELOLA BARANG
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	TARGET
1	Tersedianya pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan dibidang barang milik Daerah	Jumlah Kartu Pemeliharaan	Jumlah Kartu Pemeliharaan	
		Jumlah Barang yang telah terkodefikasi	Jumlah Barang yang telah terkodefikasi	
		Jumlah Laporan Mutasi Barang semesteran dan Tahunan	Jumlah Laporan Mutasi Barang semesteran dan Tahunan	3 Laporan
		Jumlah Laporan Belanja Modal	Jumlah Laporan Belanja Modal	12 Laporan
		Jumlah Barang Inventaris yang telas di distribusikan	Jumlah Barang Inventaris yang telas di distribusikan	180 kegiatan
		Jumlah barang yang diusulkan penghapusan	Jumlah barang yang diusulkan penghapusan	85 berkas

	Jumlah Laporan Penyusutan Aset	Jumlah Laporan Penyusutan Aset	1 Laporan
	Jumlah KIR di setiap Ruangan	Jumlah KIR di setiap Ruangan	13 Ruangan
	Jumlah Barang Inventaris yang telah dientry ke dalam Aplikasi Aset	Jumlah Barang Inventaris yang telah dientry ke dalam Aplikasi Aset	550 Barang
	Jumlah BAST Barang	Jumlah BAST Barang	20 Berkas
	Jumlah Rencana Kebutuhan barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Berkas

**PERJANJIAN KINERJA PENGEMUDI
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	TARGET
1	Terselenggaranya koordinasi, pengelolaan data dan penyusunan laporan administrasi umum	Jumlah Periode Peengecekan dan Pemeliharaan Kebersihan dan Keamanan Mobil Dinas	Jumlah Periode Peengecekan dan Pemeliharaan Kebersihan dan Keamanan Mobil Dinas	65 kali
		Jumlah Periode Pemeliharaan Mobil Dinas	Jumlah Periode Pemeliharaan Mobil Dinas	12 kali
		Jumlah Periode Antar Jemput pada Hari Efektif	Jumlah Periode Antar Jemput pada Hari Efektif	240 kali

**PERJANJIAN KINERJA PETUGAS KEAMANAN
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	TARGET
1	Terpenuhinya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Kantor Inspektorat	Persentase Area yang aman tertib disekitar lingkungan kantor	$(\text{Area yang aman tertib disekitar lingkungan kantor} : \text{Total Area Kantor}) \times 100\%$	90%

**PERJANJIAN KINERJA PETUGAS KEBERSIHAN
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	TARGET
1	Terpenuhinya Kebersihan di Lingkungan Kantor Inspektorat	Persentase Area kebersihan disekitar lingkungan kantor	$(\text{Area bersih disekitar lingkungan kantor} : \text{Total Area Kantor}) \times 100\%$	90%